

**PERILAKU POLITIK UMAT ISLAM DI KABUPATEN KARO
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2013**

Oleh:

**SAIFUL AMIR
2120124090**

**Program Studi
PEMIKIRAN ISLAM**



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAK



Nama : Saiful Amir
NIM : 91212012490
Program Studi : Pemikiran Islam
Judul : Perilaku Politik Umat Islam Di Kabupaten
Karo Dalam Pemilihan Gubernur Dan wakil
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Katimin M.Ag
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nst. MA

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu tindakan memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan baik daerahnya. Kecenderungan untuk memilih salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah terbentuk oleh suatu sikap perilaku politik umat Islam dalam memilih, yang telah dibentuk dari lingkungan dan persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kecenderungan yang mempengaruhi perilaku politik Umat Islam khususnya dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Karo. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi (triangulasi), yang mana data wawancara diperkuat dengan data table. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor calon/ kandidat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih, selain itu juga faktor media masa sebagai sumber informasi turut serta mempengaruhi kecenderungan perilaku pemilih.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye politik yang tergolong rendah, karena tidak mengetahui secara jelas tentang proses kampanye politik masing-masing calon/ kandidat. Saran peneliti adalah merubah cara berkampanye calon/kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang hanya menonjolkan visi dan misi yang kurang realistis dalam memaparkan program kerja para calon/ kandidat Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara kepada masyarakat. Selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التجريد

: سيفولا أمير

الاسم

رقم الاسمي : .
شعبة : تفكير الاسلام
موضوع الرسالة : سلوك الاساسية امة الاسلام في المديرية كارو في اختيار المحافظ
ونائب المحافظ سومطرى الشمالى في السنة
المشرف الاول : الدكتور كتيمن الماجستير
المشرف الثانى : الدكتور حشيشة الماجستير

ليتبع مع المجتمع فى اختيار العام لرئيسة الدائرة ليشكل الاسياء الاجراءات الاختيارية
الرئيسة ليوحد رءيس بأحسن الدائرة. مول للأختيار واحد منها المرشح فى الأختيار الرئيسة
الدائرة مشكل لسلوك الأساسية أمة الإسلامية فى الأختيار الذى يشكل من حول المجتمع . هذا
التفتيش بقصد ليعرف العامل المول ليؤشر سلوك الأساسية أمة الإسلامية لمخصوص فى
المعطر صوته لاختيار محافظ ونائب المحافظ فى سومطرى الشمالية السنة فى المديرية كارو.
أَلْأَصْلُ بِقَصْدِ هَذَا إِخْتِيَارُ، فَطَرِيقَةُ التَّفْتِيْشِ لِتَسْتَمَلْ فى الاختيار هى الصريقة التفتيشية.
التركة لتستعمل الحقائق المحادثى قوى بالحقائق الجداول. حاصل من الاختيار، بالعامل الوسائل
الصلة بالجمهير مثل منابع الاعلان اشترك فى المؤثر مول السلوك الاختيار.

درجات الاسترك المجتمع فى الجدوال الحملة الاساسية محسوب من نوع الوطنى
لان لاتعرف لظهير عن الطريقة الحملة اساسية كل واحد المرشح. اقتراح الفاحش هو لتغير
طريقة الحملة المرشح المحافظ ونائب المحافظ سومطرى الشمالى فى السنة ليظهر فقط
بصيرة وارسالية ينقص الوقعى فى الشرح البرامج العمل بمرشح المحافظ ونائب المحافظ
سومطرى الشمالى على المجتمع. سيوى من الحكومة طلب ليمنى البرامج احتال المجتمع فى
الدائرة الركة البعيدة من مراكز الحكومة.

Abstract

Muslim Political Behavior In Karo In the election of Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2013 2013.

Community participation in elections of regional heads is an act of choosing a leader that can lead to either region. Tendency to choose one candidates in the local elections was formed by an act of political behavior of Muslims in the vote, which had been formed from the environment and perceptions public. This study aims to determine the factors that influence political behavior tendencies Muslims especially in providing the right to vote in the General Election Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2013 in

Karo District. Based on the research objectives, the research methods used in this study is a combination of research methods (triangulation), which reinforced the interview data with the data table. The results showed that the factor of the candidates have a major influence on voting behavior, it is also a factor as the mass media resources to participate trends influencing voter behavior.

The level of public participation in political campaign activity is low, because it does not know clearly about the political campaigns of each candidates. Suggestions researchers are changing the way candidates campaign for Governor and Vice Governor of North Sumatra in 2013 featuring only the vision and mission of the less realistic in describing the work program of the candidates Sumatra Governor and Deputy Governor of the North to the public. In addition, the government is required to develop programs to empower communities in remote areas far from the center of government.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATAPENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Batasan Istilah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu	16
F. Garis Besar Isi.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik	18
1. Pengertian Partisipasi Politik	18
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	26
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	28
B. Perilaku Politik	34
1. Definisi Sikap Dan Perilaku	34
2. Defenisi Perilaku Politik	36
3. Defenisi Pemilih.....	37
4. Pendekatan Dalam Perilaku Politik.....	38
5. Jenis-jenis Pemilih	56
C. Pemilihan Kepala Daerah	56
1. Asas-asas Pmilukada.....	58
2. Peserta Pemilukada	59

BAB III Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian	60
1. Jenis Penelitian	61
2. Lokasi Penelitian	61

3. Waktu Penelitian	62
B. Populasi Dan Sampel	63
C. Teknik Sampling	63
D. Defenisi Oprasional	64
E. Metode Pengumpulan Data.....	65
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data	68

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Dan Keadaan Geografi	70
B. Penduduk	75
C. Pemerintahan	77
D. Perilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013	82
1. Agama Dan Perilaku Politik.....	82
2. Deskripsi Responden.....	86
3. Deskripsi Jawaban-jawaban Responden	87
E. Pemahaman Umat Islam Terhadap Isu-isu Politik Lokal Dan Nasional	95
F. Partisipasi Umat Islam di Kabupaten Karo Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013	98
G. Faktor Kecendrungan Umat Islam Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013	102
H. Analisa Pandangan Perilaku Politik Uang	108
I. Pandangan Strategi Dalam Pemilihan Selanjutnya.....	110
J. Keterbatasan Penelitian.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	115
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Karo.....	12
Tabel 2 Jadwal Kegiatan	62
Tabel 3 Kisi-kisi Instrumen.....	67
Tabel 4 Luas Daerah Menurut Kecamatan/ Area Of Sub District	73
Tabel 5 Curah Hujan/ Rainfal	75
Tabel 6 Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Per Kecamatan.....	76
Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	77
Tabel 8 Rumah Ibadah di Kabupaten Karo	77
Tabel 9 Demografi Responden.....	87
Tabel 10 Jawaban Responden mengenai pengenalan Calon/ Kandidat Pemilukada	88
Tabel 11 Jawaban Responden Mengenai Kegiatan kampanye Calon/ Kandidat Pemilukada.....	89
Tabel 12 Jawaban Responden Mengenai Penilaian Visi Dan Misi Calon/ Kandidat	90
Tabel 13 Jawaban Responden Mengenai Penilaian Latar Belakang (<i>Track Record</i>) Calon/ Kandidat Pemilukada	91
Tabel 14 Jawaban Responden Mengenai Harapan terhadap Kampanye Calon/ Kandidat	91
Tabel 15 Jawaban Responden Mengenai Keikutsertaan Dalam Kegiatan kampanye Calon/ Kandidat Pemilukada	91
Tabel 16 Jawaban Responden Mengenai Informasi Politik Lokal Dan Nasional.	92

Tebel 17 Jawaban Responden Mengenai Diskusi Politik	93
Tebel 18 Jawaban Responden Mengenai Pengaruh Media Kampanye	94
Tebel 19 Jawaban Responden Mengenai Intesitas Informasi Politik Melalui Media	94
Tebe 20 Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Politik Berdasarkan Jenis Klamin.....	99
Tebel 21 Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Politik Berdasarkan Usia .	100
Tebel 22 Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Politik Berdasarkan Tingkat pendidikan	100
Tebel 23 Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Politik Berdasarkan Pekerjaan	101
Tebel 24 Kecendrungan Responden Dalam Partisipasi Politik Berdasarkan Jenis Klamin.....	103
Tebel 25 Kecendrungan Responden Dalam Partisipasi Politik Berdasarkan Usia	103
Tebel 26 Kecendrungan Responden Dalam Partisipasi Politik Berdasarkan Pendidikan	104
Tebel 27 Kecendrungan Responden Dalam Partisipasi Politik Berdasarkan Pekerjaan	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengkaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat hubungan dan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintah, dari, oleh dan untuk rakyat, maka rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Hal ini menjadi niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno sekitar 2.500 tahun yang lalu¹.

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Sistem demokrasi liberal, sistem komunis, atau sistem otoriter sebagaimana yang banyak diterapkan di beberapa negara dunia ketiga, hampir semuanya telah melakukan pemilu secara internasional. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolok ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara.²

Keberadaan pemilu sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada dan tidaknya pemilu, namun lebih pada tingkat pelaksanaan pemilunya. Artinya, semangkin pemilu itu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti yang dijalankan secara *free and fair*, maka semangkin demokratis suatu negara. Betapapun begitu harus disadari bahwa pemilu bukanlah satu-satunya tolok ukur tegaknya sistem politik demokrasi. Sebab, disamping adanya pemilu yang bebas dan adil, demokrasi membutuhkan persyaratan-persyaratan lain diantaranya

¹Jendri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. xiv.

²Muhamad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h. 3.

adalah akuntabilitas pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR), kebebasan menyuarakan pendapat dan berorganisasi, dan sebagainya.³

Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi di suatu negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga. *Pertama*, pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Sejarah mencatat, tidak jarang peralihan kekuasaan yang dilakukan di luar sarana pemilu menyebabkan terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah. Beberapa negara yang melakukan transfer kekuasaan melalui kudeta biasanya (cenderung) menyebabkan adanya kudeta pada kekuasaan transfer kekuasaan berikutnya. Oleh karena itu, agar proses pergantian kekuasaan dapat berjalan baik dan damai, diperlukan adanya seperangkat aturan main yang memungkinkan hal itu terjadi, dan dalam perspektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah pemilu yang bebas dan jujur (jujur dan adil).

Kedua, melalui pemilu akan terciptanya pelembagaan konflik. Diakui atau tidak, sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik secara terbuka. Bahkan, Przeworski⁴ mencatat, demokrasi itu sendiri merupakan hasil kontingen dari konflik. Permasalahannya adalah penyelesaian konflik-konflik itu, khususnya yang berkaitan dengan konflik memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Adanya pemilu secara bebas dan adil, memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik, sebab kelompok-kelompok non penguasa, khususnya para oposisi, yang ingin mengganti pemerintah akan memusatkan tenaganya untuk menghadapi pemilu dan bukannya menyerang pemerintah melalui kekuatan fisik. Selanjutnya, pihak penguasa bisa melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi penantangannya melalui pemilu dan bukannya menekan melalui kekerasan fisik dan senjata.

³Rusli Karim, *Tinjauan Global: Demokrasi menjelang Abad ke-21*, dalam *Jurnal Unisia*, No. 36, 1998, h. 34.

⁴Adam Przeworski, *Democracy as a Contingent outcome of Conflict*, dalam Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h.3-4.

Permasalahan mengenai proses pelaksanaan pemilu yang benar-benar bebas dan adil, sebab, jika tidak maka terjadi protes masa untuk menentang penyelewengan dalam penyelenggaraan kekuasaan, yang juga tidak jarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Banyak kasus menunjukkan, fenomena munculnya kekerasan politik diseperti pemilu, tidak saja pemilu secara nasional akan tetapi pilukada sering terjadi.

Secara konseptual, setidaknya terdapat dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. *Pertama*, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pemilu yang dilakukan secara nasional maupun di tingkat lokal, dalam hal ini KPUD, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut sebagai sistem pemilihan (*Electoral system*). *Kedua*, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh kalangan ilmuwan politik disebut sebagai proses pemilihan (*Electoral process*).⁵

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para pemimpin atau wakilnya sebagai pengatur kekuasaan. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif DPR/DPRD, sistem pemilu bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati/ walikota, dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi.

Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*Indirect democracy*), yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil

⁵Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Prilaku Pemilih 1955 dan 2004*, h. 4.

pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah rakyat⁶. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama sesuai kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai⁷. Demikian juga Pemilu, partai politik, partisipasi rakyat merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan demokrasi⁸. Konsep dan pemahaman yang seperti inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti dikemukakan di atas, pemilu-pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik, dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintah daerah. Dalam banyak catatan peneliti, selain ada upaya untuk menyentuh perubahan substantif demi perbaikan dan penyesuaian dengan keadaan kependudukan dan daerah, hampir semua Undang-undang pemilu yang pernah dilahirkan di Indonesia gagal menangkal terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap hak politik rakyat dalam memilih dan dipilih. Kecuali pemilu tahun 1955 dan (secara *relative*) pemilu tahun 1999, semua pemilu di Indonesia diwarnai oleh kecurangan yang menjadi sisi gelap dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.⁹

Jika kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, Kabupaten/

⁶Jendjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, h. xv.

⁷Ichlasul Amal, "Pengantar" dalam Ichlasul Amal (ed), *teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1988), h. xi

⁸Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indosnesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 61.

⁹Jendjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, h. xvi.

Kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, melalui ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Rumusan ini telah menimbulkan permasalahan *Pertama*; yaitu bahwa Pemilukada dapat dilakukan secara langsung (seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, disingkat Pilpres) atau secara tidak langsung (oleh DPRD seperti yang dipraktekkan sebelumnya dan yang diatur dalam UU no 32 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.¹⁰

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui Pemilukada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU NO.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan didalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon

¹⁰A. Mukthi Fadjar, *Pemilu: Perselisihan dan Demokrasi*, (Malang:Setara Press,2013), h. 102.

perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu¹¹.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pemilukada adalah: *Pertama*, dengan Pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. *Kedua*, Pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, dengan Pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

Setelah diundangkannya UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan diderivasi berbagai penjelasan teknisnya oleh PP no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang mungkin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampaui mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni.

Keputusan untuk memilih sistem Pemilukada langsung bukan datang dengan tiba-tiba. Banyak faktor yang mendukung percepatan digunakannya sistem langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi.

¹¹Bungaran Anthonius Simanjuntak, *et.al., Otonomi Daerah, Enasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), h. 95-99

Sistem PemiluKada dapat dikatakan sistem yang ideal karena berbagai alasan yaitu :

Demokrasi langsung menunjukkan perwujudan kedaulatan di tangan rakyat, akan dihasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan langsung dari rakyat, permainan politik yang bisa diperkecil karena tidak mungkin menyuap pemilih dalam jumlah jutaan orang. PemiluKada yang sesungguhnya adalah bagian dari sistem politik di daerah. Sistem PemiluKada juga bagian dari sistem politik di daerah.

Keterlibatan secara sukarela dalam PemiluKada merupakan indikator positif atau negatifnya rakyat daerah sebagai warga yang mempunyai hak politik sebagai *voter*. Tentu saja rakyat sebagai warga negara agar dapat berperan aktif dalam partisipasi politik perlu terapkan pendidikan politik dari berbagai agennya. Tanpa terapan itu maka sukar untuk mendapatkan kadar partisipasi politik yang baik dalam kerangka demokrasi.

Bentuk partisipasi politik rakyat daerah dalam PemiluKada langsung ini dapat dilihat dari berbagai bentuknya, mulai dari sebagai orang atau kelompok yang apolitis, pengamat, maupun partisipan. Seperti pada dua pemilu yang lalu maka akan ada prosentasi rakyat yang apolitis dalam arti mereka yang termasuk tak acuh dalam kegitanan proses politik. Di Indonesia, persentase rakyat yang apolitis masih di bawah 30 % rata-rata. Sementara bentuk pengamat merupakan porsi yang paling banyak, yaitu mereka yang melakukan pengaruh dalam proses politik sebatas sebagai anggota organisasi, hadir dalam kampanye, dan *voter*. Sementara dalam bentuk partisipan, diantaranya rakyat terlibat sebagai aktivis partai, dan kelompok kepentingan. Sebagai aktivis, partisipasi politik rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki jabatan-jabatan organisasi/ politik.

Aktor utama sistem PemiluKada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga aktor inilah yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian tahapan-tahapan kegiatan PemiluKada langsung, yaitu:

1. Pendaftaran pemilih
2. Pendaftaran calon

3. Penetapan calon
4. Kampanye
5. Pemungutan dan penghitungan suara, dan
6. Penetapan calon terpilih.

Karena Pemilu merupakan implementasi dari demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui asas-asas Pemilu langsung yang terdiri dari: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas jujur dan adil diimplementasikan pada dua tataran yaitu, tataran normatif dan tataran moralitas pelaksanaan pemilu. Tataran aturan normatif sendiri dari dua jenis, yakni aturan preventif berisi ketentuan tentang tindakan-tindakan yang harus dan yang tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahap pemilu. Aturan preventif juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil.

Sedangkan aturan represif adalah ketentuan yang memberikan ancaman hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No 10 tahun 2008 terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana pemilu baik kepada pemilih, peserta, penyelenggara, bahkan pejabat pemerintah¹².

Salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat pemilu tidak dimanipulasi adalah peradilan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), yang menajadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). PHPU bukan sekedar mekanisme penyelesaian perbedaan perhitungan antara KPU dengan peserta pemilu. PHPU juga merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa tidak ada satu suara pemilih pun yang dimanipulasi, tidak ada calon yang terpilih karena mengambil suara dari peserta lain, atau calon yang menang karena menggelembungkan perolehan suara.

Mekanisme perhitungan suara ditentukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi secara nasional oleh KPU. Pada setiap tingkatan,

¹²Jendri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, h. 47.

perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka yang dihadiri para saksi peserta pemilu dan pemantau. Bahkan, penyelenggaraan pemilu juga harus memberikan salinan berita acara dan salinan penghitungan (rekapitulasi) kepada setiap saksi peserta pemilu. Dengan demikian, sesungguhnya sangat kecil kemungkinan terjadinya perbedaan penghitungan suara KPU dengan peserta pemilu. Apabila terjadi perbedaan, kemungkinan besar adalah karena adanya pelanggaran dengan memanipulasi suara pemilih. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap asa jujur dan adil.

Lebih dari itu, hasil pemilu yang tidak sesuai tidak hanya terjadi karena memanipulasi suara pada saat penghitungan, tetapi karena pelanggaran yang meluas, sistematis, dan terstruktur, yang mencedraai asa jujur dan adil. Pemilu yang demikian adalah pemilu yang mengingkari prinsip kedaulatan rakyat sebagai ruh konstitusi.

Pada tanggal 7 Meret 2013 rakyat Sumatera Utara telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan salah satu bentuk perubahan demokrasi, yang telah dikemukakan diatas.

Peserta pemilih adalah calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan. Pasangan calon adalah yang paling penting dalam Pemilukada, dimana mereka yang akan bersaing merebut hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki kursi jabatan seperti yang kita ketahui yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara merupakan pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan diperoleh 5 pasang calon yang terdiri dari¹³:

1. Pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman didukung oleh partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya (PGIR), Partai Bulan Bintang (PBB), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), Partai Matarhari Banga (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PDI), PartaiIndonesia Sejahtera (PIS), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdatul Ulama

¹³ <http://www.kpusmut.org>.

Indonesia, Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Kedaulatan, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pelopor, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Buruh, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).

2. Pasangan Effendi Simbolon- Djumiran Abdi didukung PDI Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).
3. Pasangan Chairuman Harahap- Fadly Nurzal Pohan didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Republikan.
4. Pasangan Amri Tambunan- Rustam Effendy Nainggolan di dukung oleh Partai Demokrat.
5. Pasangan Gatot Pujo Nugroho- Tengku Ery Nuradi yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Patriot, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Dengan sistem Pemilukada Langsung yang berlangsung di Sumatera Utara, sebelum berjuang mendapatkan dukungan dari masyarakat, setiap pasangan calon harus terlebih dahulu berusaha merebut dukungan Partai Politik sebagai jalan untuk maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumatera Utara 2013.

Walaupun rakyat yang menentukan siapa yang akan menduduki kursi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah akan tetapi partai politik tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar, dikarenakan partai politik yang dapat menentukan apakah setiap pasang calon bisa maju atau tidak dalam pemilihan umum, partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD di daerah yang bersangkutan dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan¹⁴.

¹⁴ PP No 6 tahun 2005 pasal 36 ayat 2.

Sebanyak 33 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Sumut dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara, Ganteng Menangi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013. Faktanya pasangan nomor lima (GanTeng) tersebut unggul di 16 kabupaten/kota yang umumnya memiliki basis suara terbesar di Sumut. Seperti Medan, Deliserdang dan Langkat. Pasangan GanTeng secara potensial menguasai sepanjang pesisir timur dari perbatasan Aceh sampai Riau.

Bahkan beberapa kabupaten/kota di pantai barat ternyata didominasi juga oleh GanTeng seperti Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat dan Mandailingnatal. Total keseluruhan hasil perolehan suara dipastikan akan membawa GanTeng unggul satu putaran.

Sedangkan di posisi kedua diperoleh pasangan Effendi Simbolon – Jumiran Abdi (Esja) yang menguasai 13 kabupaten kota. Wilayah kemenangan Esja berada di sebagian besar wilayah pantai barat seperti Dairi, Sibolga, Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara. Humbanghasundutan. Ditambah basis suara potensial PDI Perjuangan di Siantar, Simalungun dan Karo. Esja juga unggul di empat daerah di Kepulauan Nias seperti Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara dan Nias induk.

Untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), kemenangan terbagi dua kepada pasangan yang lahir di daerah tersebut yaitu Gus Irawan Pasaribu-Soekirman (GusMan) dan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal (Charly). GusMan di Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan, sedangkan Charly menang di Palas dan Paluta.

Karena pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Karo maka data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Karo di dominasi oleh pasangan Efendi simbolon dan Jumiran Abdi, seperti yang terlihat di dalam tabel berikut.

Tabel 1
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN KARO¹⁵

A. Suara Sah

	Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur	Jumlah Akhir/ Pindahan
1	2	3
1	H. Gus Irawan Pasaribu, SE Ak, MM dan Ir. H, Soekirman	16, 671
2	Drs. Effendi MS. Simbolon dan Drs. Jumiran Abdi	53,473
3	Drs. H. Chairuman Harahap, SH, MH dan H. Fadly Nurzal, S.Ag	5, 313
4	Drs. H. Amri Tambunan dan Dr. R.E. Nainggolan, MM	19, 811
5	H. Gatot Pujo Nugroho dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si	25, 965
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur		121, 233

Sumber KPUD Kabupaten Karo, 2013

Keterlibatan masyarakat Islam dalam Pilkada sebagai salah satu bentuk partisipasi politik. Perilaku politik masyarakat pada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur priode 2013-2016 menarik untuk diapresiasi melalui sesuatu terlebih mengingat bahwa perilaku pemilih tersebut menentukan keberhasilan dalam satu putaran pilukada. Dalam konteks ini perilaku pemilih yang dimaksud antara lain adalah pada pelaksanaan kampanye, pada pelaksanaan pemberian suara, dalam keterlibatannya terhadap partai-partai politik dan juga dalam pengamanan hasil pilukada tersebut.

Pemilihan kepala daerah secara langsung terkait dengan peran masyarakat dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik atau pasangan calon yang ada. Pemilihan kepala daerah juga berkaitan dengan perilaku pemilih masyarakatnya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi preferensi kandidat dari pemilih tersebut. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal, dimana faktor internal antara lain status sosial yang terdiri

¹⁵ KPUD Kabupaten Karo, 2013. Jln. Cut Ditiro, Kabanjahe.

dari pendidikan, penghasilan, pekerjaan masyarakat tersebut. Selain faktor internal ini juga seperti hubungan keluarga yang terdiri dari kedaerahan atau lokalitas, historis, agama, etnis (suku) dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari media kampanye yang digunakan disaat sosialisasi, partai politik pendukung calon dan sebagainya. Salah satu faktor tersebut adalah etnis yang dianggap sebagai faktor penting dalam perilaku pemilih di Indonesia.

Fenomena perilaku pemilih tampaknya akan menjadi persoalan dikalangan masyarakat, sebab kecenderungan dalam memberikan suara akan berdampak pada masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat golongan bawah. Misalnya Pemilih yang hanya melihat dari penampilan fisik dari seorang kandidat, pemilih ini dalam menentukan pilihannya berdasar atas emosi mereka, sehingga tidak heran kalau kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang diharapkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kehidupan rakyatnya. Hal merupakan konsekwensi dari pilihan kita yang hanya berdasar atas suka dan tidak suka bukan berdasar atas kapabilitas dan integritas seseorang dalam menjatuhkan pilihannya, lalu bagaimana pilihan masyarakat Islam sendiri dalam menentukan pilihannya, apakah mereka termasuk dari pemilih rasional, kritis, tradisional atau skeptis.

Fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Karo dapat kita analisis dengan menggunakan pendekatan perilaku atau untuk lebih tepatnya perilaku pemilih. Perilaku pemilih adalah kompleks dan selalu berubah-ubah. Secara umum menurut para ahli perilaku pemilih dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional¹⁶.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masyarakat Islam di Kabupaten Karo, hal terjadi diakibatkan kecenderungan perilaku pemilih yang berubah-ubah dan hasil penelitian itu akan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul: *Prilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo Tahun 2013*.

B. Rumusan Masalah

¹⁶Muhammad Asfar, *Pemilu dan Prilaku Memilih, 1955-2004*,. h.135-150

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu di teliti.

Seperti yang dikemukakan di atas fokus kajian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman umat Islam Kabupaten Karo terhadap isu-isu politik?
2. Bagaimana partisipasi pemilih umat Islam dalam Pemilu pada tahun 2013 di Kabupaten Karo?
3. Apa yang menjadi faktor kecenderungan Umat Islam memilih dalam Pemilu Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur tahun 2013?

C. Batasan Istilah

Dari Judul diatas, ada beberapa istilah yang perlu dibatasi pengertiannya agar istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut diatas menjadi jelas dan tidak memberikan salah pengertian maupun penafsiran ganda, istilah yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Prilaku Politik adalah sebuah perilaku atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan proses politik, yakni proses dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik¹⁷.
2. Umat adalah bentuk serapannya yaitu kata "*umat*", juga digunakan oleh agama-agama selain Islam di Indonesia untuk menyebut para pemeluknya, contohnya umat [Kristiani](#), umat [Hindu](#), dan lain-lain¹⁸.
3. Politik adalah hal-hal mengenai urusan ketatanegaraan yang menyangkut sistem dan kebijakan pemerintah¹⁹.
4. Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) secara langsung di Indonesia, yang dilakukan oleh penduduk daerah setempat, sesuai dengan syarat Undang-undang Pemilu. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi

¹⁷ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik kontemporer*(Yogyakarta: Cakrawala 2009) h, 227

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1243.

¹⁹Telly Sumbu,dkk, *Kamus Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), h. 639.

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten.

Dari uraian diatas dapat dijlaskan apa yang dimaksud dengan penulis dengan judul *Prilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo Dalam Pilkada 2013*, adalah tindakan umat Islam dalam memberikan hak suara untuk memilih calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera utara tahun 2013 di Kabupaten Karo

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman umat Islam Kabupaten Karo terhadap isu-isu politik
2. Untuk mengetahui partisipasi umat Islam Karo dalam Pemilu pada tahun 2013 di Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui faktor kecendrungan Umat Islam memilih dalam Pemilu pada Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur tahun 2013

Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi para peneliti untuk mengkaji tentang politik Islam
2. Menambah bidang keilmuan bagi para mahasiswa
3. Sebagai kelengkapan penyelesaian Studi S-2 (Strata 2) di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terdahulu tersebut harus di-*review*. Dalam *review* tersebut dikemukakan apa kekurangan peneliti-peneliti terdahulu dan hal-hal yang masih perlu penelitian

lanjutan. Menurut Abdurahman²⁰, semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama Peneliti dan tahun penerbitnya.

Sejauh ini Penulis belum menemukan pokok pembahasan yang pernah dibahas oleh Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Tetapi peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah berbentuk Skripsi yang pernah di dibuat di Universitas Sumatera Utara dengan judul: *Perilaku Pemilih Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Etnis Karo Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo 2010)*. Oleh: [Andry Gina Pramesti](#) Ginting. Pemilukada ini ditunjukkan sebagai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2010. Kemudian saya juga menemukan judul terkait yang ditulis oleh Irma J.S. Sebayang dengan judul: *Prilaku etnis Karo Dalam Pemilihan Bupati Karo Priode 2010-2015*. Karya ini di terbitkan ditahun 2012 di lembaga pendidikan yang sama. Selain itu juga judul yang hampir mirip juga pernah ditulis oleh mahasiswa IAIN Sumatera Utara, dengan judul *Sikap dan Prilaku Politik Masyarakat Islam Dalam Pemilihan langsung Gubernur Sumatra Utara 2013 (Analisa: Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara)* oleh Fitri Susanti Lubis pada tahun 2013. Dalam pembahasan ini dilakukan di tingkat Kelurahan bukan pada tingkat Kabupaten/kota yang memiliki cakupan wilayah yang luas.

Berdasarkan karya ilmiah yang peneliti temukan, tetapi belum menemukan yang secara khusus membahas Prilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo Dalam Pilkada Tahun 2013.

F. Garis Besar Isi

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam suatu sistematika berdasarkan bab per bab sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan, kajian terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dankegunaan penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah merupakan pembahasan tentang alasan utama penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah merupakan inti masalah yang akan diteliti

²⁰Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Ciputat: Logos, 1999), h. 51

sehingga diketahui masalah utama yang menjadi pokok penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksud untuk mendeskripsikan signifikansi penelitian baik untuk masyarakat umum maupun akademis. Batasan istilah merupakan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian sehingga ditemukan sasaran yang sebenarnya dari penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan penelaahan terhadap berbagai karya yang membahas masalah ini sehingga diperoleh informasi bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Metodologi penelitian

Bab II Studi Kepustakaan yang meliputi: Defenisi Partisipasi Politik, Bentuk-bentuk partisipasi Pengertian Perilaku dan sikap Pendekatan-pendekatan Dalam Memahami Prilaku pemilih,

BabIII Metodologi Penelitian merupakan pembahasan tentang bagaimana penelitian dilakukan dan instrument apa yang digunakan. Sedangkan garis besar isi pembahasan merupakan uraian tentang isi yang digunakan dalam menulis laporan. Kajian ini meliputi Lokasi penelitian, Waktu penelitian Teknik pengumpulan data, sampel dan populasi, Teknik sampling, Defenisi oprasional, Instumen pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV Prilaku politik Umat Islam di Kabupaten Karo dalam Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur Sumut tahun 2013. Kajian ini Meliputi Geografi dan demografi Kabupaten Karo, dan pemerintahan selain itu juga untuk menyesuaikan rumusan masalah kajian ini juga memuat prilaku umat Islam dalam Pemilukada, yang dilihat dari segi motivasi dan faktor-faktor kecendrungan pemilih yang merupakan inti dari penelitian

Bab V Merupakan penutup berisikan kesimpulan terhadap prilaku umat Islam di Kabupaten Karo serta saran-saran yang perlu diperhatikan dalam menyikapi perilaku umat Islam dalam Pilkada Cagub dan Cawagub tahun 2013.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

Sebagai tolok ukur atau landasan berpikir dalam menyoroti untuk memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Tinjauan pustaka ini perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (*Trial and error*)²¹. Menurut Hoy dan Miskel, teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan perilaku berbagai organisasi²². Sebelum melakukan penelitian perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitannya dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

Pada bagian ini akan diuraikan dengan menggunakan dua kerangka dasar dijadikan landasan dalam penulisan tesis ini, kerangka dasar tersebut adalah partisipasi politik dan perilaku pemilih.

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Penggunaan teori partisipasi politik dalam tesis penelitian ini adalah karena tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu atau Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat keberhasilan pemilu ataupun Pilukada semakin tinggi.

²¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung Alfabeta, 2004), h. 55

²²*Ibid.*, h. 56.

Secara bahasa, partisipasi²³ adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Sedangkan politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, “*Polis*” yang artinya kota (*City*) atau negara kota (*City state*) dari polis timbul istilah lain *polite* artinya warga negara, *Politicosi* artinya kewarganegaraan, *Politiketechen* artinya kemahiran berpolitik, dan selanjutnya orang-orang Romawi mengambil alih istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.

Menurut Miriam Budiardjo²⁴, politik (*Politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*Distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber (*resources*) yang ada.

Menurut Ramlan Surbakti, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²⁵ Dengan demikian jelaslah bahwa politik yang bersangkutan paut dengan soal-soal negara dan pemerintah.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Dalam kamus Litre mendefinisikan politik sebagai ilmu

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, h. 831.

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 8.

²⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 1.

memerintah dan mengatur negara, sementara konsep lain mengatakan bahwa politik cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Disamping itu politik juga dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).

- a. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- b. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- c. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik.

Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Secara umum apa-apa saja yang menjadi indikator bagi peran atau partisipasi politik adalah menarik apa yang ditawarkan Rush dan Althoff mengenai hierarki peran atau partisipasi politik. Anggota masyarakat suatu negara mempunyai hak-hak tertentu yang juga harus diperhatikan oleh negara melalui aktivitas pemerintahannya.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam proses pemilihan umum di tingkat lokal maupun nasional. Dalam UU NO.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan Parpol. Sedangkan didalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah

orang²⁶. Dengan demikian peran serta atau partisipasi politik masyarakat menutup kemungkinan munculnya kekuasaan yang bersifat otoriter dan anti demokrasi. Dibawah ini disajikan pendapat beberapa tokoh:

- a) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the social Science*:” Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum: (*The term: political participation*” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly, in the formation of public policy)²⁷.
- b) Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science: Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/ or the actions they take)²⁸. Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. (the authoritative of values for a society).*
- c) Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi

²⁶Bungaran Anthonius Simanjuntak, *et.al., Otonomi Daerah, Enasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012). h, 95

²⁷Herbert McClosky, “*Political Participation: International Encyclopedia of the Social Science*, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka cipta, 1990), h. 1.

²⁸Norman H. Nie dan Sidney Verba, “ *Political Participation: Handbook of Political Science, Fred I, Grenstein dan Nelson W. Polsky, alam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 1-2.

yang dimaksud untuk mem-pengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By Political Participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).²⁹

Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (*Private citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi, dan memperotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi diatas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai government) dan juga politik secara luas semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebetulnya tema cetral dari proses demokratisasi.

Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan sebagai partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* mengatakan partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga Negara. Melalui partisipasi individu menjadi warga publik, mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Disini partisipasi dalam kata lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaan individu (warga) dalam melihat antara kepentingan privat dan publik. Urusan publik memiliki hukum dan nilainya sendiri yang tidak bisa dicampuradukkan dengan urusan private maka dari itu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena melukai partisipasi dan melanggar hukum publik.

²⁹Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson” No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”, dalam Miriam Budiharjo, Partisipasi dan partai politik Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 2.

Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi publik. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warga sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

Menurut Rush dan Althoff partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.³⁰ Menurut Ramlan Surbakti, bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.³¹

Budiardjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*).³² Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*Contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Sementara Mylbarth dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa teori. *Pertama*, adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. *Kedua*, adalah spekulator yakni orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. *Keempat*, pengkritik yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu partisipasi³³”

³⁰Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003), h. 3

³¹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cetakan keempat (Jakarta:Grasindo,1984), h. 140

³²Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, h. 9

³³Ramlan Surbakti op cit h. 141.

Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Seperti mengajukan alternatif kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, mempengaruhi pemerintah prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kudeta revolusi dll

Dari berbagai definisi yang diberikan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi politik mengacu pada kegiatan warga negara pada dua hal pokok yaitu proses pemilihan penguasa (pemerintah) dan pengawasan pada aktifitas penguasa yang terpilih. Aktifitas kedua ini berupa kegiatan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (kebijakan). Setelah mengetahui konsep partisipasi politik tampak sederhana dan mudah dilakukan, maka partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat/Muslim tokoh agama pada hakikatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh tokoh atau masyarakat tersebut.

Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki

keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Dalam partisipasi politik berlaku proses-proses politik yang harus dipahami dan diikuti, baik laki-laki atau perempuan. Yang dikatakan oleh Easton, proses politik adalah interaksi diantara lembaga-lembaga pemerintah atau kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan tidak hanya aktivitas-aktivitas sebagai kelompok yang terorganisir di luar pemerintah dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif. Sehingga berpartisipasi tidak sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara katif mental emosional dan perilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian penting.

Dengan demikian, maka partisipasi itu tidak hanya keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan seseorang sehingga akan menimbulkan tanggungjawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Dari pernyataan di atas, maka ada tiga unsur dalam partisipasi yaitu:

- a) Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b) Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- c) Dalam partisipasi harus ada tanggungjawab, unsur tanggungjawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan serta merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan individu atau kelompok dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas, dan ketiga unsur partisipasi tersebut didalam realitanya tidak akan terpisah satu sama lain, tetapi akan saling berhubungan.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu³⁴:

- a) Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang beorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.
- b) Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada *output* politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik usulan perbaikan.

Berdasarkan jumlah pelakunya bentuk partisipasi politik dikategorikan menjadi dua yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dalam bentuk kegiatan seperti menulis surat yang berisikan tuntutan atau keluhan kepada pemerintah, sedangkan kolektif adalah bentuk kegiatan warga negara secara serentak dimaksud untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilihan umum.

Namun, berbeda dengan Huntington dan Nelson³⁵ menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan perilaku yakni:

- a) Kegiatan pemilihan mencakup pemeberian suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye.
- b) Mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah bentuk

³⁴Ramlan Surbakti, h. 143.

³⁵Huntington dan Nelson, *Partisipasi*, h. 16-19

partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

- c) *Labbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
- d) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- e) Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang.
- f) Tindakan kekerasan (*Violence*), sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda.

Oleh karena itu kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang lebih kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah atau merubah seluruh sistem politik. Almond³⁶ mengklasifikasikan kegiatan partisipasi dengan pendekatan konvensional dan non konvensional, kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern sedangkan non-konvensional termasuk yang beberapa mungkin legal maupun ilegal penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara.

Bentuk partisipasi politik yang berupa pemberian suara (*Voting*) merupakan suatu bentuk yang paling umum digunakan dari masa lampau hingga sekarang, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Disamping itu pemberian suara boleh jadi merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling

³⁶Almond Gabriel, *Sosialisai Kebudayaan Dan Partisipasi Poitik*, dalam Mochtar Mas' oed & Mac Avidrews (Eds), *Perbandigan Sistem Politik* (Yogyakarta: UGM University Press, 1984),h. 89.

luas tersebar di berbagai masyarakat. Bentuk partisipasi politik lewat pemberian suara dewasa ini lagi dikaitkan dengan sistem politik yang sedang berlangsung di suatu negara. Dengan kata lain, aktifitas pemberian suara tidak tergantung apakah negara yang bersangkutan menggunakan cara-cara demokrasi atau totaliter dalam pemerintahannya. Bagi negara yang bersistem demokrasi persoalan partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara ini bukanlah persoalan yang rumit karena aktifitas pemberian suara selaras dengan sikap demokrasi tersebut.

Menurut Budiardjo³⁷ bentuk partisipasi politik yang lain adalah kegiatan kampanye. Kampanye biasanya dilakukan sebelum kegiatan pemberian suara atau pemungutan suara. Ditinjau dari segi kuantitasnya lebih banyak dibandingkan dengan diskusi politik, namun dari segi kualitas tampak adanya dua kelompok dalam kegiatan tersebut. *Pertama*, pada kelompok mayoritas yang kegiatannya terbatas, yang hanya ikut-ikutan saja tanpa didasari kejernihan berfikir serta strategi tertentu. *Kedua*, adalah kelompok minoritas yang selain aktif dalam kegiatan kampanye juga berperan sebagai penggerak.

Secara sederhana Budiardjo³⁸ membagi partisipasi dalam dua bentuk. Bentuk partisipasi aktif antara lain memberikan suara dalam pemilu, turut serta dalam demonstrasi ataupun memberikan dukungan keuangan dengan memberikan sumbangan. Bentuk partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi yang sebentar-sebentar, misalnya dalam diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, ditempat kerja maupun antara sahabat-sahabat.

3. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi beberapa hal yang berkaitan dengan sistem politik dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain:

- a) Faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapat, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

³⁷Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, h. 5

³⁸*Ibid*, h.5

b) Faktor politik. Arnstein S.R mengemukakan³⁹, peran serta politik masyarakat didasarkan kepada kebijakan politik untuk menentukan suatu produk akhir.

Faktor politik ini meliputi:

- 1) Komunikasi politik merupakan suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika. Pemahaman dasar tentang komunikasi politik adalah bahwa orang bertindak terhadap objek berdasarkan makna objek itu sendiri. Akan tetapi, makna sebuah objek, demikian telah dikatakan, apakah objek itu manusia, tempat peristiwa, gagasan atau kata, tidak tetap dan statis. Orang harus meneruskan menyusun makna sebagai objek dengan menangani objek-objek itu sendiri. Secara singkat, orang berperilaku terhadap objek dengan memberikan makna yang pada gilirannya diturunkan dari perilakunya sebagai individu. Melalui kegiatan komunikasi memberi-dan-menerima di antara makna dan tindakan ini orang memperoleh kecenderungan tertentu. Kecenderungan ini bukanlah pengaturan sebelumnya untuk bertindak dengan cara tertentu dalam situasi yang baru. Kecenderungan tidak menentukan perilaku lebih dulu, tetapi kecenderungan adalah kecenderungan dari suatu kegiatan. Kecenderungan menunjukkan garis tindakan kepada seseorang, tetapi bukan satu-satunya garis. Apa yang diperhitungkan orang saat menemukan makna dalam situasi yang baru, mungkin saja itu merupakan kecenderungan yang dimilikinya, tetapi tidak perlu selalu demikian. Apalagi, sebagai kecenderungan dari kegiatan, bukan untuk kegiatan. Kecenderungan sendiri mengalami perubahan ketika orang menyusun makna dalam dunia subjektif

³⁹Ramlan Surbakti, *memahami Ilmu Politik*, h. 119

dan perilaku sesuai makna itu sendiri⁴⁰. Oleh karena itu dalam aktifitas partisipasi politik perilaku pemilih tidak selamanya tetap, bahkan bisa berubah-ubah.

- 2) Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.⁴¹
 - 3) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, tentunya akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.⁴²
 - 4) Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakn publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik. Kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*. Juga mengemukakan ekspersi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan ketrampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan actual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pem-bangunan.
- c) Faktor fisik individu dan lingkungan. Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang berlangsung berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok serta lembaga dan pranatanya.

⁴⁰Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak Dan Efek*, (ed), Jalaluddin Rakhmat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3-4.

⁴¹Mirian Budiardjo, h. 22

⁴²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 196

- d) Faktor nilai budaya, Gabriel Almond dan Sidney Verba, nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan terhadap kekuasaan.

Kesadaran politik menyangkut integritas pengetahuan yang dimiliki di dalam lingkungan masyarakat dan politik serta minat dan perhatiannya terhadap lingkungan. Kepercayaan politik menyangkut bagaimana penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaan pemerintah. Penilaian ini merupakan rangkaian dari kepercayaan, artinya apabila pemerintah dipandang tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik untuk berpartisipasi secara aktif merupakan hal yang sia-sia. Berdasarkan tinggi rendahnya Paige membagi partisipasi menjadi beberapa tipe.

Pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. *Kedua*, Sebaliknya apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi rendah maka partisipasi politik cenderung apatis. *Ketiga*, berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. *Keempat*, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi politik tidak aktif (pasif). Variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik adalah status sosial dan ekonomi. Kedua hal ini memiliki kontribusi yang penting dalam kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi yang cenderung tinggi, dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi yang cenderung tinggi dari pada orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Demikian pula kaitannya dengan status ekonomi, seseorang yang memiliki status ekonomi tinggi dipandang lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan status ekonominya yang rendah. Variabel lainnya adalah afiliasi politik orang tua yang memiliki pengaruh besar terhadap aktifnya seseorang dalam politik dan pengalaman-pengalaman organisasi yang dimiliki.

Partai politik juga memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi politik rakyat. Orang yang berpartai politik sering memberikan suara daripada yang tidak berpartai, orang yang setia kepada partainya bahkan lebih aktif lagi. Misalnya di partai buruh di Eropa bekerja keras untuk menarik golongan masyarakat yang berstatus rendah sehingga golongan ini mempunyai dukungan organisasi bagi tuntutan-tuntutannya dan dorongan untuk berpartisipasi politik.

Di Inggris buruh tidak pelajar sering jauh lebih aktif dari rekan-rekannya. Di Amerika Serikat, dimana orang yang golongan rendah belum banyak dibantu oleh organisasi politik. Selain itu calon-calon yang memiliki daya tarik pribadi yang kuat dapat membawa banyak ke-apolitis kedalam kegiatan politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang atau masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum antara lain:

- 1) Pendidikan, merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk peningkatan pengetahuan teori dan keterampilan memutuskan persoalan-persoalan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Pendidikan dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik dan meningkatkan kemampuan menganalisa serta menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Semakin tinggi tingkat pendidikan di masyarakat menjadi semakin tinggi kesadaran politiknya, demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat kesadaran politiknya.
- 2) Jenis kelamin dan status ekonomi sosial, perbedaan jenis kelamin dan status sosial juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya laki-laki lebih aktif daripada wanita. Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Artinya bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipasi juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh rakyat dalam partisipasi politik, menunjukkan derajat kepentingan mereka. Kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang hanya memiliki

kedudukan sosial yang rendah tentunya tingkat partisipasinya akan rendah dan sebaliknya orang yang berstatus ekonominya tinggi lebih aktif tingkat partisipasi.

- 3) Aktifitas kampanye, biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara.

Namun demikian yang menjadi permasalahan dalam tingkat dan bentuk partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut. Adapun faktor pendidikan, komunikasi dan masalah umum lainnya yang menjadi persoalan adalah timbulnya partisipasi politik masyarakat yang rendah dan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Semuanya itu sangat penting jika dilihat banyaknya masyarakat yang ikut ambil bagian partisipasi politik. Berikut ini memberikan empat alasan partisipasi politik seseorang yakni:

- 1) Keterbukaan dan kepekaan terhadap perangsang politik melalui kontak pribadi, organisasi dan melalui media masa akan memberikan pengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.
- 2) Karakter sosial, status ekonomi, suku (etnis), usia, jenis kelamin dan keyakinan/ agama merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh yang relative cukup besar terhadap partisipasi politik.
- 3) Sistem politik dan sistem partai, dalam negara demokratis partai-partai politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa untuk itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
- 4) Perbedaan regional, merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan pikiran dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional ini ikut mempengaruhi perilaku dan partisipasi politik. Perilaku politik individu muncul karena interaksi dari sikap sosial dan sikap individu yang didasari oleh situasi yang dihadapi.

Perkembangan partisipasi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan faktor-faktor tersebut. Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilalui oleh masyarakat Indonesia.

Kondisi politik, sistem politik, struktur politik dan kematangan perilaku politik masyarakat menjadi bagian yang penting dari partisipasi politik.

Menurut Morris Roseberg⁴³ dalam bukunya *Pengantar Sosiologi* bahwa ada tiga alasan orang-orang enggan berpartisipasi dalam politik, dikarenakan oleh:

- 1) Konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas politik pada umumnya, karena dengan ikut serta dalam aktifitas politik tertentu, dilihat sebagai suatu ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan mereka.
- 2) Bahwa individu dapat menganggap aktifitas politik sebagai suatu kerja yang sia-sia. Individu merasa ada jurang pemisah antara cita-citanya (idealisme) dengan realitas politik. Karena jurang pemisah sedemikian besarnya sehingga dianggap bahwa tidak ada lagi aktifitas politik yang kiranya dapat menjembatani.
- 3) Anggapan bahwa pemacu diri untuk bertindak atau sebagai perangsang politik adalah faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik. Maka dengan adanya perangsang politik yang seperti ini membuat atau mendorong kearah perasaan yang semakin besar dorongan apatis. Dengan hal tersebut individu maupun masyarakat lebih merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai sifat pribadi daripada sifat politiknya.

B. Perilaku Politik

1. Defenisi Sikap Dan Perilaku

Defenisi sikap menurut Edward merupakan derajat efek positif atau efek negatif terhadap suatu objek psikologis⁴⁴. Sedangkan menurut Secord dan Becman⁴⁵, sikap juga didefenisikan sebagai keturunan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*), pemikiran (*konisi*), dan responding tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar. Psikolog berusaha membuat berbagai model yang mencakup bebrbagai dimensi yang mendasari sikap tertentu. Upaya ini dimaksudkan untuk menentukan komposisi sikap agar dapat menjelaskan atau

⁴³Morris Rosenberg, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: 1997), h. 147.

⁴⁴S. Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Edisi ke-2, Cetakan ke XV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003),h.5

⁴⁵ *Ibid*, h 15

meremalkan perilaku dengan lebih baik. Sikap atau *attitud* adalah suatu konsep paling penting dalam psikologi sosial. Berdasarkan pada teori rangsang –balas (*stimulus-response theory*) menerangkan bahwa sikap adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Misalnya seseorang mempunyai sikap positif terhadap makanan pedas akan selalu makan setiap kali ia menemukan makanan pedas. Sebaliknya orang yang bersikap negatif terhadap makanan pedas akan selalu menghindari jika ia menjumpai makanan pedas. Sikap ini dapat terjadi terhadap situasi, orang, kelompok/ partai, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat sekitar manusia.⁴⁶

Menurut Beum menerangkan terbentuknya sikap berdasarkan pada teori Skinner bahwa tingkah laku manusia berkembang dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang memberi penguat para individu untuk bertingkah laku secara tertentu (yang dikehendaki oleh masyarakat). Menurut Miller dan Dollard dalam ada empat prinsip dalam belajar yaitu dorongan (*drive*), isyarat (*clue*), tingkah laku-balas (*response*), dan ganjaran (*reward*) yang saling terkait dan dapat mendorong organism bertingkah laku. Stimulus yang kuat yang mendorong organism bertingkah laku. Stimulus yang kuat biasanya berupa dorongan primer (*primary drive*) yang menjadi dasar untuk motivasi.⁴⁷

Bandura dan walters menyatakan bahwa tingkahlaku tiruan (*imitation*) merupakan suatu bentuk asosiasi suatu rangsang dengan rangsang lainnya. Penguat (*reinforcement*) memang memperkuat respons tetapi bukan syarat yang penting dalam khayalan (*imagination*) orang tersebut terjadi serangkaian simbol yang menggambarkan respon tersebut⁴⁸.

Menurut Leek Ajzen dan Martin Fishbein⁴⁹, sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. *Pertama*, perilaku tidak banyak

⁴⁶Sarwono, S W, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tth), h. 19-41.

⁴⁷*Ibid*, h. 24

⁴⁸*Ibid*, h. 27-28.

⁴⁹Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. *Consumer Behavior. Ninth Edition*. (New jersey: Prentice Hall International. 2007), h. 240.

ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. *Kedua*, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga norma-norma subjektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. *Ketiga*, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensitas atau niat untuk berperilaku tertentu.

2. Defenisi Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang mentaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik⁵⁰.

Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Menurut Zainuddin A. Rakhman⁵¹, secara sosiokultural, masyarakat Indonesia memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan, (2) dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dan (3) dualisme yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat di dalam masyarakat Indonesia.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan dan agama apapun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Proses-

⁵⁰Ramlan Surbakti, , *Memahami Ilmu Politik*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1992), h 13.

⁵¹Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (IKIP Semarang Press, Semarang 1995), h. 24-25.

proses politik dan partisipasi warga paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman seseorang⁵².

3. Defenisi Pemilih

Menurut Joko J. Prihatmoko⁵³ defenisi pemilih adalah sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat/ calon/calon untuk mereka pengaruhi dan yakin agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat/ calon yang bersangkutan. Pemilih dalam ha ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu idiologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Pemilihan merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok. Terdapat beberapa kelompok yang memang non-partisan, dimana idiologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka 'menunggu' sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan merasa pilih.

UU Nomor 10/2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) yang berhak memberikan hak pilihnya adalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemilih. Tapi, karena alasan tertentu pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar.

Dalam peraturan (KPU) No 35/ 2008 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya Pemilih tersebut harus mendaftarkan diri ke TPS yang baru, paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi, secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi

⁵² *Ibid*, h.26.

⁵³Joko Prihatmoko J, *Pilkada Secara Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 46.

tujuan utama para kandidat/ calon untuk mereka pengaruhi dan yakin agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat/ calon bersangkutan.

4. Pendekatan-pendekatan Dalam Memahami Prilaku pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsisten untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat/ calon yang bersangkutan.

Mengapa seseorang melakukan tindakan politik tertentu sementara yang lain tidak, mengapa orang memilih partai Golongan Karya, bukannya PAN, PKS, PBB, PKB atau PDIP? Mengapa pilihan seseorang terhadap suatu partai politik cenderung konsisten dari Pemilu ke Pemilu, sementara yang lain berubah-ubah? Mengapa kelompok masyarakat tertentu cenderung mempunyai pilihan politik yang hampir sama? Berbagai pertanyaan senada akan muncul apabila menganalisis perilaku memilih dalam suatu Pemilu.

Di banyak Negara yang sudah stabil dan melakukan Pemilu secara regular seperti di Amerika Serikat, Eropa, teori tentang *Voting Behavior* sudah demikian berkembang. Hal ini disebabkan banyak studi perilaku memilih di Negara-negara tersebut, terutama di Amerika Serikat, Kanada, Inggris Jerman, dan sebagainya. Bahkan studi perilaku memilih ini sudah berkembang di kawasan Asia. Dengan adanya sejumlah studi perilaku, maka tersedia data yang memadai untuk melakukan inferensi-inferensi teoritis.

Selama ini, penjelasan-penjelasan teoritis tentang *Voting Behavior* didasarkan pada dua model atau pendekatan. Yaitu model/pendekatan sosiologi dan model pendekatan psikologi. Dilingkungan ilmuwan sosial Amerika Serikat, model pertama disebut mazhab Columbia (*the colombi school electoral behavior*), sementara model kedua disebut sebagai mazhab Michigan (*the michigian Suevey resceac center*). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor-faktor

sosiologis dalam membentuk perilaku seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilakunya⁵⁴

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika Serikat dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan di Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih di Inggris, menyebut model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Secara singkat, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (pria dan wanita), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan suatu yang sangat vital (penting) dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dean Jaros dkk,⁵⁵ ketika mencoba hubungan antara keanggotaan dalam suatu kelompok dengan perilaku politik seseorang

⁵⁴Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 4-9

⁵⁵Dean Jaros, *Political behavior, Choice and perspectives*, (New York: St. Martin's Press, 1974), h. 111-146.

menyederhanakan kelompok sosial kedalam tiga kelompok yaitu: kelompok primer, kelompok sekunder dan kelompok kategori.

Gerald Pomper memerinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi *Voting behavior* kedalam dua variable, yaitu variable predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga, akan berpengaruh kepada keseluruhan keluarga. Predisposisi sosial ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya.⁵⁶ Dengan demikian, ikatan-ikatan sosiologis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih cukup signifikan untuk melihat perilaku memilih.⁵⁷

Hubungan antara agama dan perilaku pemilih memilih misalnya, tampak padapenelitian Lipset. Dibeberapa negara, yang mana partai tidak mempunyai batas yang jelas dengan agama, kelompok minoritas di bidang ekonomi, politik ataupun diskriminasi-diskriminasi tertentu, cenderung untuk memilih partai yang berpaham liberal atau partai yang berhaluan kiri; sementara kelompok mayoritas cenderung untuk memberikan suaranya pada partai konservatif atau partai sayap kanan. Di Amerika Serikat misalnya, penganut agama Katolik dan Yahudi, kulit hitam dan Hispanic (keturunan Latin) merupakan pendukung Partai Demokrat. Sementara kaum Anglo Saxon memberikan dukungan pada Partai Republik. Pada pemilihan presiden tahun 1984 misalnya, 68 persen orang Yahudi di Amerika Serikat memberikan suaranya untuk Partai Demokrat dibanding dengan 39 persen suara dari kaum Protestan. Sebagaimana diungkap Lipset:

“The Jewish ethic its emphasis on community and family welfare maybe contrasted to the Protestant ethic with its stress on individualism_ The former has obvious links to the principle espoused by American liberals and the democratic Party: the latter has clear relations with the values subsumed under laissez-faire competitive individualism as expressed by conservatives and the Republican Party”

⁵⁶Gerald Pomper, *Voter's Choice: Varieties of American Electoral behavior*, Dalam Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih*, h. 138

⁵⁷Mark N Frangklin, *Voting behavior*, Dalam Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih*, h. 138

Tingkat ketaatan beragama juga berhubungan erat dengan perilaku memilih. Para pemilih yang berlatarbelakang Islam santri misalnya, cenderung memilih partai PPP. Di kabupaten- kabupaten daerah tapal kuda di Jawa Timur, yang dikenal sebagai basis wilayah santri, dari pemilu ke pemilu suara PPP cukup besar. Penelitian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa para santri sebagian besar memilih PPP⁵⁸. Hal yang sama juga terjadi di Israel. Penelitian Wald dan Shye menunjukkan, semangkin besar keterlibatan seseorang dalam aktivitas keagamaan semangkin besar kecenderungannya untuk menyukai atau memilih partai-partai agama atau kelompok-kelompok sayap kanan.⁵⁹

Meskipun ddari pemilu ke pemilu hubungannya tidak selalu konsisten, jenis kelamin juga merupakan variable sosiologis yang dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih. Studi *voting behavior* di Erofa pada dekade 1970-an menunjukkan bahwa wanita lebih suka mendukung partai borjuis daripada partai sosialis, setuju dengan administrasi (birokrasi), menghindari pemihakan pada ekstrim kiri maupun ekstrim kanan dan mendukung partai moderat. Hanya saja, studi *voting behavior* di Amirika Serikat menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya persistensi pilihan kelompok wanita terhadap partai tertentu, meskipun pola kecendrungan umum setiap pemilu dapat dibedakan. Pada tahun 1952 misalnya, terdapat kecendrungan mendukung Partai Republik dibandingkan pria (29,8% wanita mengidentifikasi pada Partai Republik, dibandingkan pria yang hanya 25,6%). Namun sejak 1968, kecendrungan ini berubah. Dukungan wanita mulai cendrung ke Partai Liberal, ini terlihat pada pemilu 1972 (43,8% wanita mengidentifikasi pada Partai Demokrat, 24, 3% pada Partai Republik, sementara 31,9% mengaku independen). Setelah mengalami flukтусai selama beberapa periode, wanita mulai cendrung ke Partai demokrat.⁶⁰

Mengapa dukungan wanita terhadap suatu partai politik tidak konsisten, salah satu penjelasanya adalah ketidaksukaan wanita terhadap isu-isu perang.

⁵⁸Muhammad Asfar, *Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Kiai*, dalam Jurnal Ilmu Politik No, 17, tahun 1997

⁵⁹Kennet D. Wald and Samuel Shey, *Religious influence in Electoral Behavior, The Role of Institutional and Social Forces in Israel*, dalam The Journal of Politics, Vol 57, No 2, 1995, h. 495-507.

⁶⁰Laura W. Arnold and Harbert F. Weisberg, *Parenthood, Family Values and the 1992 Presidential Election*, dalam American politics *Quartely*, vol 2, No 2, 1995, h. 65.

Sehingga mereka akan lebih mendukung pada partai yang menghendaki berakhirnya perang, termasuk pengurangan anggaran persenjataan.⁶¹ Betapun begitu, ilmu politik tradisional umumnya menggambarkan hubungan antara wanita dan perilaku memilih adalah sebagai berikut: tingkat kehadiran dalam pemilu rendah, cenderung memilih partai sayap kanan, sikapnya lebih konservatif, lebih menyukai isu-isu moralis, cenderung mengikuti pilihan suami dan orang tua dan sebagainya.⁶²

Aspek geografis juga mempunyai hubungan dengan perilaku memilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Di beberapa negara, wilayah tertentu mempunyai loyalitas terhadap partai tertentu, sampai mampu bertahan beberapa abad. Kasus yang patut diangkat adalah loyalitas yang begitu kuat terhadap Partai Demokrat dari pemilih yang bertempat tinggal di wilayah Selatan Amerika Serikat. Penduduk di wilayah Selatan, tanpa memperhatikan faktor etnis dan kelas, umumnya merupakan pendukung tetap Partai Demokrat. Meskipun masyarakat New England pada umumnya menjadi pendukung Partai Republik, namun di wilayah Selatan mereka lebih mendukung Partai Demokrat.

Penelitian Paterson dan Rose di Norwegia menunjukkan bahwa ikatan-ikatan kedaerahan, seperti desa-kota, merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan aktivitas dan pilihan seseorang.⁶³ Ikatan kedaerahan terutama sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan terhadap kandidat/ calon. Penelitian Potoski menunjukkan bahwa para kandidat/ calon umumnya lebih diterima dan dipilih oleh para pemilih yang berasal dari daerah yang sama.

Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik adalah faktor kelas (struktur ekonomi), terutama di hampir semua negara industri. Setelah melakukan penelitian di beberapa negara (1981) Lipset menyimpulkan: *"More than anything else the*

⁶¹Gerald Pomper, *Voter's Choice: Varieties of American Electoral behavior*, (New York: Dod Mead Company, 1978) h. 42-89

⁶²Lisa Tobgy, *Political Implication of Increasing Number of Women in the Labor Force*, dalam *Comparative Political Studies, a Quarterly Journal*, Vol XXXV, No 4, 1994, h. 377-393.

⁶³Per Arnt Petterson and Lawrence E. Rose, *Participation in Local Politics in Norway: Some don't, some will, some won't*, dalam *Southeastern Political Review*, Vol 18. No1. 1996.

party struggle is a conflict among class, ... the lower income groups vote mainly for parties of the left, while the higher income groups vote mainly for parties of the right”.

Di Eropa kelompok yang berpenghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada partai sosialis atau komunis, sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung partai konservatif. Di Amerika Serikat meskipun tidak tergambar jelas, kelas menjadi basis dari partai politik. Masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja, biasanya lewat organisasi buruh, cenderung ke Partai Demokrat, sedangkan kelas atas dan menengah, kecuali di luar wilayah Selatan, merupakan pendukung Partai Republik. Sementara lingkungan kelas menengah bawah cenderung menghasilkan *status changer* (kaum Liberal), sementara lingkungan kelas menengah atas cenderung menghasilkan *status defender* (kaum Konservatif).

Namun, studi *Voting Behavior* yang lebih mutakhir, terutama di Inggris menunjukkan fakta yang sebaliknya. Penelitian Anthony Heath (1991) dan Mc. Allister (1990) menemukan bahwa pengaruh kelas, baik yang objektif maupun yang subjektif, pada perilaku memilih di Inggris sangat kecil, lebih kecil dari masalah-masalah perumahan, pendapatan dan rasa persatuan anggota. Temuan yang sama juga terjadi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Afan Gaffar menunjukkan bahwa kategori kelas dalam perilaku memilih di Indonesia tidak begitu dominan. Tidak ada perbedaan kecenderungan perilaku politik antara mereka yang masuk kategori orang kaya ataupun orang miskin; antara yang memiliki tanah luas dan sedikit, antara yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan buruh tani dan sebagainya.⁶⁴

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis berkembang di Amerika Serikat yang berasal dari Eropa Barat, Pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat Karena dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat melalui *Survey Research Center* di

⁶⁴Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, h. 159-174

Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut sebagai mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah Agust Campbell.

Munculnya pendekatan ini merukan reaksi atas ketidk puasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap, secara metodologis, sulit diukur, sebagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi, pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/ mendukung suatu partai politik tertentu sementara yang lain tidak.⁶⁵

Di samping itu, secara materi, yang menjadi persoalan apakah benar variable-variable sosiologis seperti status sosial-ekonomi keluarga, kelompok-kelompok primer ataupun sekunder, itu yang member urunan pada perilaku memilih. Mungkinkah variable-variabel itu dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku pemilih (politik) seseorang, bukan karakter sosiologis.

Sesuai dengan namanya pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap, untuk menjelaskan sikap perilaku memilih. Menurut pendekatan ini para pemilih di Amerika Serikat menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologi yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil (baik lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah) misalnya, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik.⁶⁶

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, yang merupakan variabel yang cukup

⁶⁵Richard G. Niemi and Harbert F. Wiisberg, *Controversies of Voting Behavior*, (Washington DC. A Division of Congressional quarterly Inc, 1984), h. 9-12

⁶⁶Mark N. Franklin, *Voting Behavior*, dalam saymour Martin Lipset (ed), *The ensiklopedia of democracy*, Volume IV (Washington DC. A Division of Congressional quarterly Inc, 1995, h. 1346-1347

menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, oerientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat/ calon.⁶⁷

Pendekatan psikologis menganggap sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik seseorang, hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, yang menurut Greentein mempunyai tiga fungsi⁶⁸. *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilain terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesesuai diri, artinya, seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik bati atau tekanan psikis, yang mudah berwujud mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.

Namun sikap bukanlah suatu yang bersifat asal jadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang. Mulai baru lahir hingga dewasa. Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap perkembangan pada masa anak-anak. Anak-anak mulai mempersonifikasikan politik. Fase ini merupakan proses belajar keluarga. Anak-anak belajar pada orang tuanya tentang bagaimana perasaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik; bagaimana orang tua mereka menganggap isu-isu politik, dan sebagainya. Tahap kedua adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat menginjak dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga, seperti di sekolah, kelompok/ teman sebaya, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi-asosiasi lainnya.⁶⁹

Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakat atau partai politik

⁶⁷Richard G. Niemi and Harbert F. Wisberg, h. 12-13

⁶⁸Greenstein, *Personal and Politics* (Chicago: Morkham Publishing, 1969), h. 113.

⁶⁹David Apter, *Pengantar Analisis Politik* (Jakarta: LP3ES,1985), h. 262-267.

yang berupa simpati terhadap partai politik. Ikatan psikologis inilah yang kemudian dikenal sebagai identifikasi partai. Bagi penganut pendekatan psikologis, konsep identifikasi partai ini dijadikan variable sentral untuk menjelaskan perilaku pemilih seseorang. Sebagaimana yang diakui oleh Czudnowski, " *This approach also particular adequate for the analisis of voting in the United States, where party identification has been found to be the single most important variable determinising voting preferences.*"⁷⁰

Bagi penganut pendekatan psikologis, hubungan atau pengaruh antara identifikasi partai dengan perilaku pemilih sudah menjadi aksioma. Setelah mengamati perilaku memilih di Inggris dan menemukan data bahwa sebagian besar pemilih di Inggris memilih partai yang sama dari pemilu ke pemilu selama seperempat abad, Denver menyimpulkan bahwa teori-teori perilaku memilih (hanya) dalam satu hal; Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman sepanjang hidup.

Betapapun pendekatan psikologis relative banyak pengikutnya, bukan berarti pendekatan ini lepas dari kritik. Para pengkritik mempersoalkan hubungan antara sikap dan perilaku. Apakah benar sikap seseorang mempengaruhi perilaku memilih, sebab belum tentu orang yang sikapnya menyukai partai tertentu atau kandidat/ calon tertentu dalam memilih nanti akan memilih sesuai dengan posisi sikapnya. Dalam banyak kasus, mereka yang tidak mendukung rasisme namun berperilaku seperti seorang rasis. Disamping itu benarkah dalam menjelaskan perilaku seseorang itu dapat dihubungkan secara langsung dengan perilaku politik? Tidakkah ada variable-variabel perantara yang justru lebih bisa menjelaskan, misalnya dalam banyak kasus, para ahli psikologi sering menggunakan teori A.H. Maslow tentang hirarki kebutuhan manusia untuk menjelaskan perilaku politik seseorang, padahal dalam realitas sulit ditemui, atau secara konseptual sukar dipahami, hubungan antara perilaku actual dengan konsep kebutuhan tanpa meletakkan konsep antara seperti keinginan misalnya.⁷¹

⁷⁰Moshe M. Czudnowski, *Comparing Political Behavior* (London: Sage Publikation, Inc. 1976), h. 76.

⁷¹Christian Bay, *Politic and Psoudopolitics : A. Critical Evaluation of Some Behavior Literature*, dalam, Heinz Eulau (ed), *Behaviorlism in Political Sciencet*, h. 109-137

Disamping itu, dalam berbagai penelitian sering terjadi kesalahan pengukuran terhadap konsep identifikasi partai. Akibatnya, stabilitas variable identifikasi partai sebagai penjelas perilaku memilih sering diperdebatkan.

Hanya saja, beberapa penelitian mutakhir menunjukkan menurunnya pengaruh identifikasi dalam menentukan pilihan pemilih. Penelitian Bowler dan Lanouedi Kanada pada decade 1990-an menunjukkan menurunnya pengaruh identifikasi, ia menggunakan istilah loyalitas partai. Penelitian Goldberg di Israel menunjukkan temuan yang lebih ekstrem, yakni semakin melemahnya peranan identifikasi partai dan menguatnya peranan variable penilaian terhadap kandidat/calon. Bahkan, untuk menggambarkan betapa rapuhnya peranan identifikasi partai pada pemilu 1994 di Israel, ia memberikan judul dalam tulisannya: *a decline of party identification*.⁷²

3. Pendekatan Rasionalis

Dua pendekatan terdahulu secara implicit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika mereka berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Karakter sosiologis, latarbelakan keluarga, pembelahan cultural, afiliasi-afiliasi okupsi, ataupun identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variable-variabel yang secara sendiri-sendiri atau komplementer mempengaruhi perilaku pemilih seseorang. Pemilih seakan-akan berada pada waktu dan ruang yang kosong, yang keberadaan dan ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya.

Kalau saja hal ini mengandung banyak kebenaran, yang jadi permasalahan adalah upaya untuk menjelaskan tentang adanya variasi perilaku memilih pada suatu kelompok yang secara psikologis mempunyai persamaan karakteristik, dan yang lebih penting lagi, upaya untuk menjelaskan pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama. Seorang yang mempunyai karakteristik sosial seperti jenis kelamin, agama,

⁷²Giora Golberg, *Trade Union and Party Politics in Israel: A Decline of Party Identification* dalam *The Journal of Social Political and Economic Studies*, Vol 23. No 1.1996, h. 53-73.

pekerjaan, status sosial dan ekonomi yang sama selama sepuluh tahun, tetapi memberikan suara yang tidak sama pada setiap pemilu.

Jika demikian ada variable-variabel lain yang menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa merupakan isu-isu politik ataupun kandidat/ calon yang dicalonkan.

Dengan demikian penjelasan-penjelasan perilaku pemilih tidaklah harus permanen, seperti karakteristik-karakteristik sosiologis dan identifikasi partai, takan tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa dramatic yang menyangkut persoalan-persoalan mendasar. Dengan begitu isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat/ calon yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmu politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP (organisasi Partai Politik) yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sekecil-sekecilnya.

Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan peryibangasn rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (*Maximum gained*) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. Tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*leask risk*), yang penting mendahulukan selamat. Dengan begitu, diasumsikan para pemilih

mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Begitu juga mampu menilai kontestan (kandidat/ calon) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu-isu politik atau kandidat/calon ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, peribadi yang populer karena prestasi dibidang masing-masing seperti, seni, olah raga, organisasi, politik dan sebagainya.

Meskipun begitu, penilaian terhadap isu dan kandidat/ calon bukanlah sesua yang secara tiba-tiba, namun sering dipengaruhi oleh informasi yang diterima pemilih melalui media massa yang diikutinya. Berita dan komentar-komentar negatif, seringkali mempengaruhi penilaian terhadap kandidat/ calon, posisi kandidat/ calon dalam suatu isu, dan preferensi kandidat/ calon dalam suatu kebijakan tertentu, termasuk evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional.⁷³ Menurut hemat penulis tidak saja isu-isu negatif saja yang mempengaruhi calon pemilih akan tetapi isu-isu positif turut serta mempengaruhi penilaian terhadap kandidat/ calon.

Dalam terminologi Hucfeldt dan Carmines, penjelasan perilaku pemilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbang rasional dan kepentingan personal diatas, disebut sebagai tradisi ekonomi politik (*Political economic tradition*).⁷⁴ Tradisi ekonomi politik, sebagaimana teori-teori special dan pendekatan rasional lainnya, dikembangkan dari asumsi teoritis yang dibangun oleh Anthony Downs(1967) tentang *Economic theory of democracy*. Dalam pandangan Downs, jika seseorang bertindak rasional berdasarkan kepentingan dirinya, maka kemungkinan besar mereka tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Pendapat Downs ini banyak mendapatkan kritikan, terutama berkaitan dengan data empirik tingginya tingkat kehadiran pemilih dan instrumen pengukuranya yang dinilai kurang tepat.

Bagaimanapun penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada isu-isu diatas belakangan ini lebih dapat menjelaskan fenomena perilaku pemilih di banyak negara, khususnya di negara-negara yang sudah tinggi demokrasinya sudah mapan.

⁷³Marc J. Hettrington, *The Media's Role in Flaming Voters, National Economic Evaluation in 1992*, dalam *American Journal of Political Science*, Vol 40, No,2, 1996, h.327-395.

⁷⁴Charles H.Frangklin, *Measurment and the Dynamic of Party Identification*, dalam *Political Behavior*, Vol 11, No 3. 1992, h. 297-309

Namun kritik terhadap ini juga tidak sedikit. *Pertama*, asumsi-asumsi pendekatan ini dinilai sangat tidak realistis, terutama berkaitan dengan pengetahuan manusia dan motivasinya. Dalam realitasnya, tidak semua pemilih mempunyai akses yang sama terhadap informasi, sehingga mereka dapat menghitung keuntungan dan kerugian apabila memilih partai atau kandidat/ calon tertentu. Disamping itu, tidak semua pemilih memiliki informasi yang sama tentang isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga tidak bisa menilai posisi kandidat atau partai politik berdasarkan isu-isu politik yang diangkatnya.

Kedua, berkaitan dengan keberatan yang dikemukakan oleh para pendukung “model politik simbolik” seperti Edelman (1967), Sears dkk (1979), Marcus (1988) dan lain sebagainya. Gagasan utama pendekatan ini adalah, bahwa para pemilih memilih merespon simbol-simbol politik berdasarkan pertimbangan emosional dan perasaan, serta menghindari diri dari perhitungan-perhitungan yang bersifat rasional tentang informasi kandidat/ calon dan posisi kebijakannya. Banyak pemilih memilih partai politik atau kandidat/ calon berdasarkan pertimbangan emosional dan perasaan tanpa memperhitungkan isu-isu politik yang diangkat kandidat/ calon atau partai tersebut dalam suatu kampanye pemilihan.

Ketiga, teori-teori spasial pada umumnya mengalami anomali di tingkat empiris, terutama berkaitan dengan karakteristik teorinya bahwa partai politik dan kandidat/ calon cenderung mengambil posisi kebijakan yang lebih ekstrem daripada umumnya kebijakan para pemilihnya. Studi-studi yang dilakukan oleh Robinowitz (1978), Inglehart (1984), Dalton (1958), Holmberg (1988), Listhang (1991), semuanya menemukan hasil yang sama; adanya bentuk-bentuk perbedaan sikap antara pemilih dan elit. Bahkan, penelitian hasil Listhang, McDonald dan Robinowitz (1991), menunjukkan adanya suatu *empty Entry*, yaitu adanya kelompok partai di dalam suatu wilayah yang keberadaannya posisinya di luar posisi kebanyakan pemilih.⁷⁵

Hal lain yang juga perlu dicatat adanya perbedaan pengaruh diantara isu terhadap perilaku politik. Dalam realitas politik, ada beragam isu sebagai pertimbangan seseorang menentukan pilihan. Ada isu yang berkaitan dengan

⁷⁵Ramlan Surbakti, *Memilih Secara Rasional*, (Harian Sore Surabaya Post, 1992)

peningkatan pajak, perbaikan kesejahteraan rakyat, ras, gender, agama dan sebagainya. Seorang pemilih biasanya responya tidak sama terhadap isu-isu tersebut, sehingga pengaruh masing-masing isu terhadap perilaku pemilih yang juga tidak sama. Di negara-negara tertentu, ada suatu isu yang pengaruhnya cenderung menguat, sementara isu yang lain cenderung melemah. Penelitian Abramowitz di Amerika Serikat misalnya, menunjukkan menurunnya pengaruh isu rasial dan agama, padahal beberapa decade lalu, kedua variable ini pengaruhnya sangat kuat dalam menentukan perilaku pemilih.

Diamping kritik di atas, terutama untuk kasus Indonesia, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan. Persoalan utama berasal dari asumsi pendekatan rasional itu sendiri, yang menganggap para pemilih mempunyai informasi yang relative akurat mengenai setiap alternative yang tersedia, dan menganggap para pemilih bebas dari tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehendak lingkungan. Dalam kenyataanya, tidak semua pemilih mempunyai informasi yang memadai mengenai isu-isu politik dan para kandidat/ calon yang diajukan OPP, begitu juga para pemilih sama sekali tidak bebas dari tekanan lingkungan. Analogi kedua asumsi juga dapat dipersoalkan. Apabila keuntungan dalam transaksi ekonomi secara langsung dan konkrit dapat diketahui, tetapi transaksi atau pertukaran antara pemberi suara dan wakil, aray keuntungan ketika memilih partai tertentu tidak dapat diketahui secara langsung dan konkrit.

Para penganut pendekatan psikologis dan sosiologis tentu mempersoalkan hubungan antara variable-variabel dalam pendekatan politik-rasional itu dengan perilaku pemilih. Benarkah isu-isu politik dan penilaian kandidat/ calon itu sebagai suatu variabel bebas? Bisa jadi, pilihan terhadap isu politik dan penilaian terhadap kandidat/ calon itu juga dipengaruhi oleh identifikasi partai atau karakteristik-karakteristik sosiologis.

Pada sisi lain, faktor-faktor politik juga mempunyai pengaruh yang mengedepankan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang, terutama untuk menjelaskan perilaku politik di negara-negara yang sedang berkembang, yang menempatkan model pemerintahan birokratik-otoriter seperti di Indonesia (pada

era sebelum reformasi 1998). Faktor politis ini bisa berupa prosedur pelaksanaan pemilu, aturan-aturan permasalahannya, bisa juga berupa tekanan-tekanan strukturan atau paksaan. Misalnya, beberapa prosedur atau aturan pemilu membatasi kelompok-kelompok tertentu untuk bisa menggunakan hak politiknya. Orang-orang tahanan atau secara politis dianggap musuh Negara tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Di Indonesia, kebanyakan para bekas aktivis partai komunis atau organisasi terlarang lainnya tidak diperbolehkan ikut pemilu.

Dalam pemilu di Indonesia misalnya, paksaan yang muncul pada umumnya dilakukan dalam tiga ancaman, yaitu: ancaman administratif, ekonomi dan ideologi. Ancaman administrative dikeluarkan oleh aparat pemerintahan desa atau kelurahan dalam bentuk, misalnya, tidak akan memberikan pelayanan surat keterangan (KTP, pertanahan, Akte dan lain sebagainya) kepada warga yang tidak memilih OPP (organisasi partai politik) tertentu. Bentuk ancaman administratif ini tidak berupa ancaman verbal, tetapi dalam bentuk perlakuan seperti menghindari atau mengabaikan orang tersebut, atau memperlambat pelayanan. Konsekuensi ancaman ekonomi bagi yang tidak memilih OPP (organisasi partai politik) tertentu adalah kehilangan pekerjaan pada sector publik dan swasta atau kehilangan tanah garapan. Konsekuensi ini bisa menyebabkan hilangnya sumber kehidupan. Bentuk baru dari ancaman ekonomi adalah tidak diberi jabatan atau tugas yang jelas di suatu kantor atau tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan tambahan yang mendatangkan pendapatan ekstra⁷⁶. Pada pemilu 1971, cukup banyak orang memilih OPP (organisasi partai politik) tertentu karena takut dituduh sebagai anggota atau simpatisan partai terlarang. Mengabaikan ancaman ideologis semacam ini tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri tetapi juga keturunannya. Untuk itu, demi rasa aman, tidak bisa lain kecuali memilih OPP (organisasi partai politik) tertentu. Dalam konteks semacam ini seorang pemilih memilih partai politik berdasarkan pertimbangan minimalisasi resiko ini tampaknya juga dimasukan dalam penjelasan rasional.

⁷⁶Ramlan Surbakti, *Apakah Masih ada Paksaan Dalam Pemilu*, Harian Surya, 1992.

5. Jenis-jenis Pemilih

Dalam Memilih sebuah partai politik ataupun kandidat/ calon, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya. Perilaku ini berasal dari hasil persepsi pemilih dalam melihat profil maupun trade record dari kandidat/ calon. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non rasional dalam menentukan keputusannya.

Menurut Quist dan Crano penting untuk mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa dan bagaimana pemilih meyorakan pendapatnya.⁷⁷ Secara Psikologis, Newcomb dan Byne mengungkapkan bahwa untuk menganalisa rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (Similarity) dan ketertarikan (*attraction*). Dasar penggunaan tersebut karena setiap individu akan tertarik kepada suatu hal atau seseorang bila memiliki system nilai dan keyakinan yang sama. Maksudnya adalah bila dua pihak memiliki karakteristik yang sama (*similiary*) maka akan semakin meningkatnya ketertarikan (*attraction*) satu dengan yang lainnya. Demikian juga halnya di dalam dunia politik, dikenal dengan model kedekatan (*proximity*) atau model spatial. Model ini menjelaskan bahwa pemilih yang memiliki kedekatan dan kesamaan system nilai dan keyakinan dengan suatu partai maka akan mengelompok pada partai tersebut.

Firmazh Membagi dua jenis kesamaan yang akan dalam menilai kedekatan dengan partai politik atau seorang kandidat/ calon, yaitu: *Pertama*, kesamaan akan hasil akhir yang ingin dicapai (*policy- problem-solving*). *Kedua*, kesamaan akan faham dan nilai dasar idiologi (*idiology*) dengan salahsatu partai atau seorang kandidat/ calon. Kesmaan pertama berkaitan dengan kemampuan kandidat/ calon dalam menawarkan solusi masalah. Menurut Pattie dan Johnston (2004), persektif akan menjadi penting di saat kampaye pemilu, karena kandidat/ calon dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemilih akan program kerja kandidat/ calon melalui penyediaan informasi dan komunikasi yang efektif. Sargen,

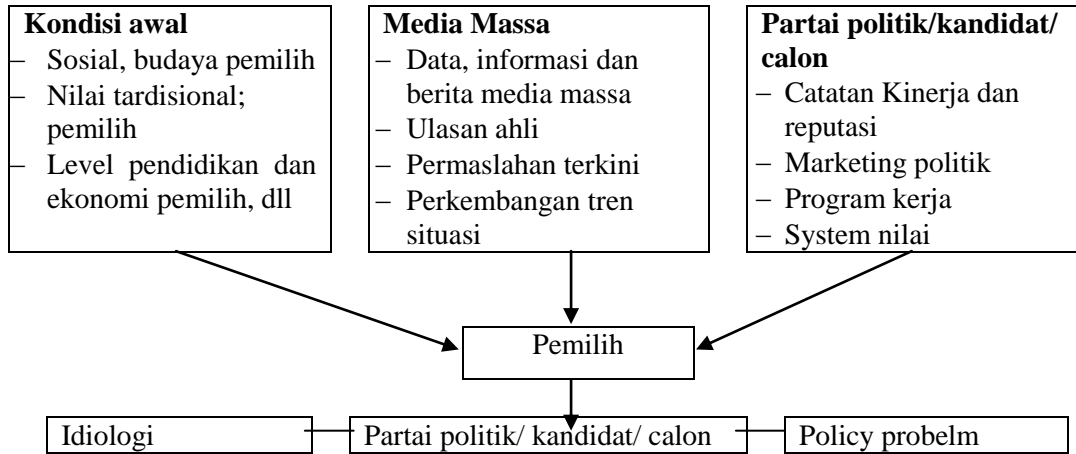
⁷⁷Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), h. 13.

memberikan batasan tentang ideologi sebagai sebuah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai suatu fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok.

Menurut Firmazah⁷⁸ karakteristik pemilih yang didasarkan kepada kesamaan ideologi, lebih menekankan pada aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma dan geografis. Maksudnya adalah, pemilihan cenderung berkelompok kepada kandidat/ calon yang memiliki kedekatan ideologi yang sama dengan pemilihannya. Kedua pendekatan model di atas tersebut di atas dapat mempermudah kandidat/ calon dan pemilih dalam memetakan kategori pemilih dan kandidat/ calon berdasarkan karakteristik kesamaan atau kedekatan. Sehingga bagi kandidat/ calon dapat menjadi dasar dan memberi arahan bagi para pemilihnya.

Menurut Firmazah pertimbangan pemilih yang mempengaruhi terbagi atas tiga faktor secara bersamaan: (1) kondisi awal, (2) media masa, (3) partai politik atau kandidat/ calon. Faktor pertama adalah kondisi awal seperti, kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selain itu juga tingkat pendidikan dan ekonomi. Faktor kedua menurut Hofstetter adalah media massa memiliki keberpihakan dan bias dalam memberikan informasi kandidat/ calon. Faktor ketiga yaitu karakteristik dari partai politik dan kandidat/ calon itu sendiri, seperti reputasi partai politik, waktu yang dibutuhkan oleh kandidat/ calon dalam membangun reputasi, kepemimpinan. Ketiga hal di atas akan mempengaruhi pilihan pemilih tentang kedekatan dan ketertarikan tentang partai politik dan kandidat/ calon.

⁷⁸ Firmazah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas...*, h. 113.



1) Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini biasa terjadi melalui 2 hal yaitu: *Pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan kepada organisasi partai atau kandidat/ calon mana mereka akan berpijak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kandidat/ calon, baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pemuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara system partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

2) Pemilih rasional

Pemilih dalam hal ini menutamakan kemampuan partai politik atau kandidat/ calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka membandingkan kinerja kepemimpinan masa lalu dengan program kerja para kandidat/ calon yang akan dilakukan, dan tawaran program yang ditawarkan oleh kandidat/ calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai persoalan, menyangkut kebijakan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik dan lain sebagainya..

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau kandidat/ calon kandidat/ calon. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang biasa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau kandidat/ calon pemilu.

3) Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kandidat/ calon sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, asal-usul, paham dan agama sebagai parameter untuk memilih sebuah partai politik atau kandidat/ calon pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat di mobilisasi selama kampanye, dan memiliki loyalitas.

4) Pemilih Skepsi

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi dengan OPP (organisasi partai politik) manapun atau kandidat/ calon tertentu. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka beranggapan bahwa, kandidat/ calon yang menjadi pemenang pemilu, hasilnya tidak membawa dampak yang begitu berarti bagi perubahan di berbagai aspek pelayanan. Misalnya kebijakan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sebagian besar negara yang berasaskan demokrasi, Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *Lobbyin*, dan sebagainya.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga merupakan sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik demokrasi Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya Orde

Baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat bebas menyalurkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada Orde Baru. Kelahiran pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup bebas memilih pemimpinnya.

Menurut Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin,⁷⁹ Proses pemilihan kepala daerah di laksanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap pendaftaran, klarifikasi, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dibidang penyelenggaraan pemerintah, pengemabngan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya pemerintah daerah.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemehrhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pemilihan kepala daerah. Pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asa langsung, umum, rahasia, jujur dan adil”

Menurut Joko. J Prihatmoko,⁸⁰ dipilihnya sistem Pilkada Langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “ hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan

⁷⁹Deddy Supriyadi dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 61.

⁸⁰ Joko J. Prihatmoko *Pilkada secara Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 1-2

memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada Langsung melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat bergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan Pemerintah daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.

1. Asas-asas Pemilukada

Salah satu indikator bahwa Pemilukada termasuk rezim hukum Pemilu adalah diadopsinya asas-asas pemilu “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil” (Luber dan Jurdil) yang tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UU 1945 oleh pasal 56 ayat (1) UU 32/2004. Oleh karena itu, ketika terjadinya Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) termasuk perselisihan Pemilukada, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal Konstitusi juga harus mengawal asas-asas pemilu tersebut, sehingga tidak semata-mata terpaku pada hasil pemilu, melainkan juga menilai proses pemilu apakah telah memenuhi asas “Luber dan Jurdil”. Itulah sebabnya, tatkala MK menilai bahwa proses Pemilu termasuk Pemilukada diwarnai oleh adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, maka MK dapat memrintahkan dilakukan pemungutan

suara dan /atau perhitungan suara ulang sebagian, beberapa, atau seluruh daerah pemilihan⁸¹.

2. Peserta Pemilukada

UU 32/ 2004 telah menentukan bahwa Peserta Pemilukada adalah pasangan calon/ kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 59 UU 32/ 2004), namun dalam perkembangannya kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 05/ PUU 05-V/ 2007 tanggal 23 Juli 2007 dimungkinkan adanya calon perseorangan yang memenuhi persyaratan tertentu yang kemudian dinormakan oleh UU 12/2008.

Masalah yang harus dicermati oleh penyelenggara Pemilu adalah masalah persyaratan calon, terutama terkait dengan dinamika Putusan-putusan MK, antara lain: persyaratan tidak pernah dipidana karena ancaman pidana lima tahun atau lebih (*vide* Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009), masalah kereteria adalah satu kali jabatan adalah separoh atau lebih masa jabatan lima tahun (Putusan No. 22/PUU-VII/2009), dan lain-lain⁸².

Kecendrungan yang mungkin terjadi diduga adalah “trik” oleh kepala daerah yang pernah menjabat dua kali masa jabatan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dengan ada harapan “peluang” untuk menjadi kepala daerah lagi, apabila kepala daerahnya berhalangan tetap. Dalam hal ini menurut hemat penulis adanya penyeludupan hukum yang harus diwaspadai, sehingga perlu pengaturan.

⁸¹ A. Mukthi Fadjar, *Pemilu: Perselisihan dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press,2013), h. 106.

⁸² *Ibid.*,h. 108-109.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian adalah penelitian kombinasi atau pendekatan kualitatif dan kuantitatif Trianggulasi. Istilah penggabungan metode ini lebih dikenal di kalangan pemula dengan istilah “*meta-metode*” atau “*mixe metode*”, yaitu metode campuran atau gabungan, dimana metode kualitatif digunakan bersama-sama dengan dalam sebuah penelitian.⁸³ Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data dari hasil wawancara dari informan, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data yang berupa angka atau kualitatif di angkakan/ *scoring*, yang diperoleh melalui kuesioner/ angket. Metode kombinasi atau model campuran, merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian

Ada dua alternatif kalau pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif memiliki peran yang sama yaitu⁸⁴:

- a) Suatu problem penelitian diteliti berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian terdapat dua penelitian untuk problem yang sama tapi menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Hasil kedua penelitian diharapkan saling memperkaya dan meningkatkan validitas kesimpulan penelitian
- b) Suatu penelitian diteliti sekaligus menggunakan kedua pendekatan secara berganti-ganti sesuai dengan aspek atau tahap-tahap yang diteliti. Dengan cara ini peneliti dapat memanfaatkan secara optimal keunggulan masing-masing pendekatan

⁸³Burhan Bunging, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*”, (Jakarta: PT. Radja Garafindo Persada, 2008), h.199.

⁸⁴Asmadi Alsa, *Pendekatan Kulitatif & Kuantitatif Serta Kombinasi Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.78.

Lisa Horison⁸⁵ mengemukakan hanya ada satu cara untuk mempelajari Perilaku politik (misalnya *Voting*), dan caranya dengan menggunakan metode kuantitatif. Akan tetapi walaupun metode kuantitatif mendominasi studi electoral, kita tidak boleh mengabaikan atau meremehkan peran metode kualitatif yang juga memberi kontribusi pada bidang studi ini. Devine juga mengatakan bahwa bias kearah metode kuantitatif telah menyebabkan “Konservatisme teoritis dan dominasi pendekatan bias-sistem untuk Prilaku Pemilih (*voting*), sedangkan “teknik wawancara intensif, mengijinkan orang untuk menjelaskan Perilaku dan sikap mereka dengan cara yang mereka anggap lebih bermakna. “*Konservatisme teoritis*” yang dimaksud adalah bahwa studi Prilaku Pemilih (*Voting*) cenderung fokus pada eksistensi variable-variabel tertentu, seperti kelas sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Devine⁸⁶ juga menunjukkan bahwa informasi ini tidak cukup mendalam, sebab wawancara terstruktur hanya memberi sedikit kesempatan bagi kita untuk memahami “biografi individu”, pegetahuan tentang keluarga dan pengalaman kerja yang membantu menjelaskan minat personal.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Karo yaitu:

- I. Kecamatan Kabanjahe,
- II. Kecamatan Munte, dan
- III. Kecamatan Berastagi.

Alasan Pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah yang penduduknya banyak beragama Islam, seperti di Kecamatan Munte, Kecamatan berastagi yang penduduknya cenderung heterogen serta kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten, hingga peneliti tertarik

⁸⁵Lisa Horison, *Metode Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h 98

⁸⁶ Devine F., *Learning More about Mass Poilitival Behavior: Beyond Dunleavy*, in D. Broughton, D. Farrell, D. Denver and C. Rallings (eds) (London: British Elections and Parties Yearbook, 1994) h, 219

untuk melakukan penelitian ketiga kecamatan ini. Selain itu akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan akan memperoleh data dari para responden.

3. Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang berlangsung dalam kegiatan penelitian. Tahap penelitian ini telah dilaksanakan di akhri perkuliahan semester ganjil di bulan Desember 2013 dan memasuki semester genap awal Januari hingga April 2014. Adapun jadwal kegiatan penelitian seperti dibawah ini

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan				
		Des 1	Jan 1	Feb 1	Mar 1	Apr 1
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penyelesaian Administrasi					
5	Pengumpulan data					
6	Penyusunan Laporan					
7	Bimbingan Tesis					
8	Pengajuan Tesis kepada Pembina					

B. Populasi Dan Sampel

Mengingat terbatas waktu, dana dan tenaga maka tidak semua jumlah pelanggan diteliti sebagai objek penelitian. Untuk mendapatkan sampel digunakan teknik *random sampling* (sampel random). Sampel random adalah sampel yang diambil dari suatu populasi dan setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan. Kualitas ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi

dengan jumlah individu tertentu dinamakan *finit* sedangkan, jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut *Infinit*.⁸⁷

Populasi berasal dari kata Inggris yaitu "*Population*" yang berarti jumlah penduduk. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian, yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, nilai, peristiwa, sikap hidup dsb, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian⁸⁸.

Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Islam yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kabupaten Karo.

C. Teknik Sampling

Untuk penelitian metode kuantitatif ini digunakan Teknik *Sampling Simple Random*, yaitu teknik Pemilihan sampling yang dilakukan secara acak (*random*) karena populasi di wilayah studi dianggap *homogen*, tidak tersebar, dan secara geografis populasinya relatif tidak besar. Berdasarkan jumlah minimal responden yang digunakan dari hasil perhitungan, pengambilan data di lapangan berjumlah 130 responden

Sedangkan teknik sampling yang digunakan untuk metode penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* (Sampel bertujuan). Sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) adalah teknik sampling yang dilakukan untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber tanpa batasan dan dilakukan secara "*snow ball*" atau makin lama makin banyak sampai informasi yang diperoleh mengalami pengulangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh jumlah narasumber sebanyak 15 orang yang berasal dari tokoh-tokoh kunci seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitator kelurahan, dan masyarakat awam

⁸⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h.271

⁸⁸Burhan Bunging, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) h, 101.

Teknik yang di gunakan dalam pengambilan sampel, dimana setiap responden dari semua populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Untuk menentukan jumlah masing-masing sampel dilingkungan tersebut maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *stratified random sampling*. Teknik pengambilan ini digunakan apabila populasi heterogen dengan variable yang diteliti⁸⁹.

D. Defenisi Oprasional

- a) Pemilukada adalah suatu bentuk atau cara untuk mlekasnakan asa- asas demokrasi baik ditingkat lokal mapun nasional, yang dilakukan secara langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia.
- b) Isu-isu politik adalah pendapat- pendapat yang belum secara jelas kepastiannya yang berkaitan dengan perpolitikan
- c) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin lokal atau nasional dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public policy*).⁹⁰
- d) Visi dan Misi Politik adalah kemampuan seseorang kandidat untuk melihat pada inti persoalan yang berkaitan dengan kebijakan politiknya. Sedangkan misi adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan-kepentingan rakyat yang meliputi kesejahteraan rakyat, kebijakan ekonomi, pendidikan sosial politik, budaya dan lain sebagainya.⁹¹
- e) Media kampaye adalah alat atau sarana yang menjadi perantara untuk menyampaikan calon/ kandidat atau partai politik dalam peserta Pemilihan umum kepada masyarakat umum, seperti koran, televisi, radio, spanduk, baliho dan lain sebagainya.

⁸⁹Husaini, *Metodologi penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24

⁹⁰ Meriam Budiarjdo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...* h. 367

⁹¹ Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h.497.

- f) Kecendrungan Pemilih adalah keinginan seseorang untuk menentukan tindakannya untuk memilih atau tidak memilih yang didasarkan atas keyakinannya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data yaitu, pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber objek yang diteliti, dalam hal ini data primer berasal dari masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Karo sebagai responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur, Jurnal, Koran dan Internet yang dianggap relevan dalam masalah yang diteliti.

F. Instrument Pengumpulan Data

Pada prinsipnya memeliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karenanya, dalam melakukan pengukuran maka memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen pengumpulan data. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah:

Pertama, angket atau kuesioner yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis dan kepada masyarakat Islam yang sudah ditetapkan sebagai sampel penelitian, yang dimaksudkan dengan sejumlah pertanyaan itu bersifat tertutup, dimaksudkan agar kita lebih memahami sifat dan Prilaku masyarakat Islam itu sendiri terkait dengan persoalan yang dikemukakan dari uraiannya. Instrumen digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner (angket), dengan

jumlah variabel sebanyak dua variabel. Dari variabel tersebut dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument dalam bentuk pertanyaan.

Tabel 3
Kisi-kisi instrument

Variabel	Dimensi	indikator	Nomor item instrumen
Perilaku Pemilih	Kondisi awal	Jenis kelamin	Responden
		Usia	Responden
		Etnis	Responden
		Pendidikan	1
	Media	Pekerjaan	2
		Jabatan masyarakat dan pekerjaan	3
		Status tempat tinggal	4
		Pengenalan kandidat	5
		Informasi perkembangan politik	11
Kandidat	Pengaruh Media	13	
	Itentitas informasi media	14	
	Pengenalan kandidat	5	
Partisipasi politik	Kampaye politik	Penilaian visi misi	7
		Penilaian trade Record	8
	Pemilihan	Keikutsertaan dalam kegiatan kampaye	10
Kecendrungan Pemilih	Kecendrungan Pemilih	Pemberian hak suara dalam pemilu	15
		Alasan pemilih	16

Kedua, Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan yang dikemukakan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab (responden atau informasi), dengan menggunakan alat yang digunakan pedoman wawancara. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dialog yang serangkaian tanya jawab agar mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara yang dilakukan secara strukur yang didasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian wawancara bebas, hal ini dilakukan dengan pertimbangan

bahwa pada saat wawancara para informan tidak menyadari sedang berlangsung wawancara. Wawancara tidak berstruktur digunakan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pdoaman wawancara yang akan ditanyakan secara bebas saat berlangsung wawancara dengan informan. Dengan melakukan wawancara ini, akan diperoleh data yang cukup akurat serta dapat dipercaya keabsahanya. Peralatan yang dipakai dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah recorder dan catatan lapangan. Bahtiar⁹² mengatakan alat bantu untuk pengamatan seperti alat potret, teropong, alat perekam suara (*recorder*).

G. Teknik Analalisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai Prilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo Dalam Pilgub Sumut 2013.

Terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya dipastikan jawaban responden berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden. Adapun analisis persentase dan rumus perhitungan skor untuk setiap item pertanyaan yaitu :

$$X = \frac{\sum (F.X)}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

⁹² Harsya W. Bahtiar, *Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta: Gramedia, 1986), h. 122-125

P = Persentase
X = Rata-rata
F = Frekuensi
 $\Sigma (F.X)$ = Jumlah skor Kategori jawaban
N = Jumlah Responden

a) Deskriptripsi Data

Deskripsi data dilakukan untuk menggambarkan keadaan masing-masing variabel penelitian yang mencakup kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan gambaran hasil yang komprehensif. Penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengisi atau menutupi celah (*gaps*) dalam penelitian kualitatif yang timbul, misalnya peneliti tidak dapat berada di dua atau lebih tempat yang sama. Secara alternatif, ini mungkin karena tidak semua seputar masalah itu saja yang hanya dapat diselesaikan melalui penelitian kuantitatif saja, atau kualitatif saja. Dengan dua variabel kualitatif dan kuantitatif dibandingkan berdasarkan hasil metode penelitian tersebut.

b) Analisis Data

Analisa data adalah untuk mengelola data yang diperoleh dari hasil pengumpulan agar hasil penelitian dapat disimpulkan, dengan demikian tersebut, ditabulasikan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis.

Data kuantitatif yang telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif yang telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data kualitatif, selanjutnya dianalisis untuk digabungkan dan dibandingkan,

sehingga dapat ditemukan data kualitatif mana yang memperkuat, memperluas dan mengukuhkan data kuantitatif. Data kuantitatif yang bersifat deskriptif atau hasil pengujian hipotesis berikut data kualitatif sebagai pelengkapannya, selanjutnya disajikan dalam bentuk table atau grafik dan dilengkapi dengan data kualitatif. Data tersebut selanjutnya diberikan pembahasan, sehingga hasil penelitian menjadi semakin jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari bab I sampai bab IV dalam penelitian mengenai Perilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemahaman umat Islam terhadap isu-isu politik lokal dan nasional, lebih sering didapat informasinya melalui media massa, (TV, Radio dan Koran) yang dalam peberitaannya lebih sering didengar atau di lihat. Keyakinan masyarakat terhadap peberitaan tentang politik setidaknya mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilukada, sebab dampak negatif dari pemeritaan tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat, seperti berita-berita tentang korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dan lembaga kepartaian

Kedua, tingkat partisipasi Politik umat Islam di Kabupaten Karo, yang didasarkan pada hasil penelitian, peran serta responden terhadap Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013, khususnya dalam memberikan hak suaranya dengan jumlah persentase sebesar 81,5% dari jumlah sampel populasi yang diteliti dari tiga kecamatan. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye politik calon/ kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013 sebesar 19,2% sedangkan yang tidak ikut atau berperan sama sekali mencapai 74% dari jumlah keseluruhan populasi sampel yang diteliti.

Ketiga, kecendrungan umat Islam di kabupaten Karo memilih pada dua aspek pernyataan yaitu pada aspek agama dan aspek penilaian visi dan misi masing-masing kandidat. Hasil perbandingan menunjukkan 36, 1 % kepada agama sedangkan 60, 0 % didasarkan pada aspek penilaian visi dan misi kandidat Gubernur dan wakil Gubernur Sumut 2013. Dengan demikian kecendrungan pemilih rasional. Karena, pemilih yang berorientasi kemampuan calon/kandidat. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak mementingkan idologi kepada calon/kandidat

B. Saran

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu prasyarat demokratisasi. Pemilihan kepala daerah dapat menimbulkan efek negatif dan efek positif. Efek negatif yang terjadi apabila kesempatan untuk menggunakan ruang demokrasi tidak digunakan dengan baik oleh rakyat yang akhirnya ruang tersebut digunakan oleh sekelompok elit. Efek positif yang ditimbulkan adalah adanya peran serta masyarakat dalam partisipasi menentukan hidupnya dengan cara memilih pemimpin lewat prosedur yang telah ditentukan. Efek positif berupa partisipasi dapat berjalan dengan baik bila masyarakat menggunakan dengan sebaik-baiknya ruang demokrasi ini. Masyarakat dapat mempertimbangkan para kandidat demi kepentingan dan kemajuan daerahnya. Pendeknya, demokratisasi dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat lebih rasional dalam menentukan tindakan politik mereka.

Perlunya sosialisasi politik berupa komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya dengan baik. Untuk itu, tugas kitalah baik ilmuwan, kalangan akademisi, pers, politikus, lembaga-lembaga politik baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk mensosialisasikan hal ini. Dengan membentuk masyarakat yang rasional dalam politik, maka demokratisasi dapat berjalan dengan dinamis tanpa “pembajakan”.

Seyogyanya Pemilukada langsung dikategorikan sebagai pemilu, sehingga kita memiliki sistem pemilihan pejabat-pejabat publik dalam lingkungan kekuasaan legislatif dan eksekutif, baik tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pengaturan Pemilukada langsung harus dipisahkan dari Undang-undang Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensinya, maka perlu penyempurnaan yang terkait dengan pemilu, tidak saja Pilpres tetapi Pilkada. Sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut terkodifikasi menjadi satu undang-undang mengenai pemilu dan mencakup pengaturan mengenai:

- a) Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
- b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

c) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Dalam kegiatan kampanye para calon/ kandidat hendaknya, mengharuskan adanya aturan yang ketat dalam tatapelasanaan kegiatan kampaye, misalnya memasang baliho yang berada di sepanjang jalan, sehingga ini mengganggu ketertiban lingkungan, dan tidak hanya itu saja ini akan menguras biaya yang cukup besar pengeluaran calon/ kandidat dalam memperoleh perhatian rakyat. Menurut penulis tingginya biaya kampaye untuk mencapai kursi kekuasaan memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam mengeluarkan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan dan Tim Redaksi, *kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan kebudayaan*. ed III Jakarta: Balai pustaka, 2001.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Prilaku Memilih, 1955-2004*. Surabaya: Eureka, 2006.
- Apter, David. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Azwar, S. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Edisi ke-2, Cetakan ke XV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, *Karo Dalam Angka*, 2013.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Karo Dalam Angka*, 2012.
- Bangun, Tridah. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Indayu Press. 1986.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Devine F. *Learning More about Mass Poilitival Behavior: Beyond Dunleavy*, in D. Broughton, D. Farrell, D. Denver and C. Rallings (eds) London: British Elections and Parties Yearbook, 1994.
- Effendi, Bahtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fadjar A, Mukthie. *Pemilu: Perselisihan dan Demokrasi*. Malang: Setara Press. 2013.
- Ferderspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*. terj. Yudian W. Aswin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996.
- Fiorina P, Morris. *Retrospective Voting in American National Election*. USA: Yale Univ. Press 1981.
- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

- Frangklin, Charles H. *Measurment and the Dynamic of Party Identification*, dalam *Political Behavior*, Vol 11, No 3. 1992.
- Gaffar, Jenedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). 2012.
- Hill, David T. dan Krishna Sen. *Media, Culture and Politics in Indonesia*.Trj, Sirkit Syah, Jakarta: PT. Sembrani Aksara Nuantara, 2001
- Horison, Lisa. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007.
- [Http//www. kpusmut.org](http://www.kpusmut.org)
- Huckson, Robert J. *Political Parties in America*. Monterey, California: Bvrooks Cole Publishing Company, 1984.
- Hettrington, Marc J. *The Media's Role in Flaming Voters, National Economic Evaluation in 1992*, dalam *Amirican Journal of Political Science*. Vol 40, No. 2. 1996.
- Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik kotemporer*. Yogyakarta: Cakrawala 2009.
- Kencana Syafi'i, Inu, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- KPUD Kabanjahe
- Labolo, Muhadam. *Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Ideks, 2011.
- Leon G, Schiffman,. and Leslie Lazar Kanuk. *Consumer Behavior. Ninth Edition*. New jersey: Prentice Hall International. 2007.
- Longman. *Longman Dictionary of Contemporary English*. Limited, Group UK, 1989.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Morris P Fiorina, *Retrospective Voting in American National Election*. USA: Yale Univ. Press1981 Morris P. *Retrospective Voting in American National Election*,USA: Yale Univ Press1981.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007

- Mulkhan, Abdul Munir. *Pergeseran Prilaku Politik dan Umat Islam 1965-1987 Dalam perspektif sosiologi*, Jakarta: P.T. Rajawali, 1989
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005
- Niemi Richard & Herbert F. Weisberg, *Controversies in Voting Behaviour*. Washington DC, USA: Congressional Quaterly, Inc. 1984.
- Nimmo, Dan. *Political Communication and Public opinion America*, Terj. Tjun Surjaman, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Prist, Darwan. *Adat Karo*. Medan: Kongres Kebudayaan Karo, 2000
- Prihatmoko, Joko J. *Pilkada secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Richard Niemi & Herbert F. Weisberg, *Controversies in Voting Behaviour*. Washington DC, USA: Congressional Quaterly, Inc. 1984, Richard & Herbert F. Weisberg, *Controversies in Voting Behaviour*. Washington DC, USA: Congressional Quaterly, Inc. 1984.
- Sastrapratedja. (ed), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Sastroatmojo, Sudijono. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001,
- Sastroatmojo, Sujijono. *Prilaku Politik*, Semarang IKIP Semarang, 1995.
- Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk. *Consumer Behavior, Ninth Edition*. New jersey: Prentice Hall International, 2007.
- Selvilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta, UUI Press, tth
- Simanjuntak, Bungaran Anthonius. *et.al., Otonomi Daerah, Enasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor, 2012.
- Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Sumbu, Telly dkk. *Kamus Politik Dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010.
- Surbakti, Ramlan. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

- _____, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Supriyadi, Deddy dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Tambun, P. *Adat Istiadat Karo*. Jakarta: Balai Pustaka, 1952.
- Undang-Undang Pemilu 2012. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Varma, SP. *Modrn Polical Theory*, (Peny) Efendi Tohir, *Teori Politik Modren*. ed,V, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1999.
- Yudian W, Aswin dan Afandi Mochtar. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad XX*. terj. Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996.
- Supriyadi, Deddy dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.